

ANALISIS KEMISKINAN MULTIDIMENSI DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Ditujukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelara Sarjana Pendidikan



Oleh:
Pandu Baniadi
NIM. 13804241042

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018**

ANALISIS KEMISKINAN MULTIDIMENSI DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Oleh:

Pandu Baniadi

NIM. 1380424142

Telah disetujui Dosen Pembimbing untuk diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.



Yogyakarta, 30 Januari 2018

Dosen Pembimbing

Mustofa, M.Sc.

NIP. 19800313 200604 1 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

ANALISIS KEMISKINAN MULTIDIMENSI DI KOTA YOGYAKARTA

Oleh:

Pandu Baniadi

NIM. 13804241042


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta pada 8 Februari 2018 dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Drs. Supriyanto, M.M.	Ketua Penguji		6/3 - 2018
Mustofa, M.Sc.	Sekretaris		7/3 - 2018
Bambang Suprayitno, M.Sc.	Penguji Utama		5/3 - 2018

Yogyakarta, 8 Maret 2018

Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan


Dr. Sugiharsono, M. Si.

NIP. 19550328198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pandu Baniadi

NIM : 13804241042

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Judul Skripsi : Analisis Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan oleh orang lain, kecuali pada bagian tertentu saya ambil sebagai acuan/kutipan dengan tata tulis karya ilmiah yang berlaku. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Yogyakarta, 30 Januari 2018

Saya Menyatakan



Pandu Baniadi
NIM. 13804241042

MOTTO

Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan

(QS Al-Insyirah: 6)

Kerja Belum Selesai, Belum Apa-Apa

(Chairil Anwar)

**Selalu Ada Kesempatan Untuk Menang, Meskipun Kalah Sering Mengintip
Peluang**

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Kepada Ibu Wagiyem dan Bapak Wijayadi, kedua orang tua saya

Untuk Jurusan Pendidikan Ekonomi tercinta

Untuk Kota Yogyakarta dan klub sepakbolanya

ANALISIS KEMISKINAN MULTIDIMENSI DI KOTA YOGYAKARTA

Oleh:
Pandu Baniadi
NIM: 13804241042

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang dialami oleh daerah, tak terkecuali Kota Yogyakarta. Persoalan kemiskinan bukan hanya terkait dengan masalah ekonomi, namun juga terkait dengan bidang lain yang sifatnya multidimensi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kemiskinan moneter, kemiskinan multidimensi, dan perbandingan antara kemiskinan moneter dan multidimensi di Kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY dan sumber lainnya sebagai pendukung. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan moneter di Kota Yogyakarta berada di angka 7,66%, sedangkan angka kemiskinan multidimensi adalah 1,39%. Tingkat keparahan kemiskinan multidimensi berada di angka 34,88% dan indeks kemiskinan multidimensi adalah 0,00487. Kemiskinan multidimensi paling banyak terjadi pada indikator kepemilikan rumah. Perbandingan menunjukkan bahwa tren angka kemiskinan moneter cenderung menurun sementara multidimensi fluktuatif.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Kemiskinan Moneter, Kemiskinan Multidimensi*

MULTIDIMENSIONAL POVERTY ANALYSIS IN YOGYAKARTA

By:
Pandu Baniadi
NIM: 13804241042

ABSTRACT

Poverty is a problem which is faced by every region, including Yogyakarta. The matter of poverty is not only related to economic problems, but also the other majors which has multidimensional characteristic.

This research aim to find out the condition of monetary poverty, multidimensional poverty, and the comparison between monetary poverty and multidimensional poverty in Yogyakarta. The data used is secondary data from D.I Yogyakarta's Indonesian Statistic Agency (BPS) and other related sources. While the analaysis method that is used in this research is descriptive analysis method.

The result of this research shows that number of monetary poverty in Yogyakarta is 7,66% while multidimensional poverty is 1,39%. The intensity of multidimensional poverty is 34,88%, while multidimensional poverty index is 0,00487. Multidimensional poverty is mostly happened by the indicator of house ownership. Comparison shows that the trend of monetary poverty is incleaned decreasing whereas the multidimensional poverty is fluctuactive.

Keywords : *Poverty, Monetary Poverty, Multidimensional Poverty*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Skripsi dalam rangka untuk memenuhi sebagai prasyarat untuk mendapat gelar Sarjana Pendidikan yang berjudul “Analisis Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta” dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan untuk menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.
2. Bapak Tejo Nurseto, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
3. Bapak Mustofa, M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dengan penuh perhatian, kesabaran dan ketelitian serta memberikan saran yang memperlancar proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Bambang Suprayitno, M.Sc. selaku narasumber skripsi yang telah memberikan saran dan masukan untuk penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Supriyanto, M.M. selaku ketua penguji skripsi yang telah memberikan saran dan masukan kepada skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah melancarkan pendidikan penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Badan Pusat Statistik Provinsi DIY atas kemudahan dalam mendapatkan data dan pelayanan yang diberikan
8. Segenap pengurus HMPE 2014, HMPE 2015, dan DPM KM FE UNY 2016 yang telah membantu dan mengajarkan banyak hal kepada saya selama ini
9. Seluruh teman-teman Pendidikan Ekonomi, khususnya teman-teman kelas 2013 B yang telah mengisi hari dengan cerita kenangan masa kuliah.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memperlancar penulisan skripsi ini.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan guna memperbaiki skripsi ini.

Yogyakarta, 30 Januari 2018
Penulis



Pandu Baniadi
NIM. 13804241042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	13
A. Deskripsi Teori	13
1. Teori Kesejahteraan	13
2. Kemiskinan	16
3. Kemiskinan Moneter	30
4. Kemiskinan Multidimensi.....	34
5. Program Pemerintah Kota Yogyakarta Terkait Kemiskinan	48
B. Penelitian yang Relevan	51
C. Kerangka Berfikir	53
D. Pertanyaan Penelitian	56
BAB III. METODE PENELITIAN	57
A. Desain Penelitian	57
B. Data dan Sumber Data.....	57
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian	57
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Teknik Analisis Data	59
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Deskripsi Obyek Penelitian	60
B. Hasil Penelitian	61
1. Kondisi Kemiskinan Moneter di Kota Yogyakarta	61
2. Kondisi Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta	63
3. Perbandingan Kemiskinan Moneter dan Multidimensi di Kota Yogyakarta	78

C. Pembahasan	79
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Rekomendasi	97
C. Keterbatasan Penelitian	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Miskin Kota Yogyakarta 2007-2015.....	6
2. Bobot Dimensi dan Indikator Kemiskinan Multidimensi.....	45
3. Dimensi dan Indikator Kemiskinan Multidimensi.....	58
4. Pengeluaran Menurut Garis Kemiskinan di Kota Yogyakarta.....	62
5. Persentase Pengeluaran Berdasarkan Makanan Dan Non Makanan Menurut Garis Kemiskinan Di Kota Yogyakarta.....	63
6. Perhitungan Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	65
7. Jumlah Rumah Tangga Miskin Setiap Indikator.....	66
8. Jumlah Penduduk Miskin Setiap Indikator.....	67
9. Fluktuasi Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta Tahun 2010, 2013, 2015, dan 2016.....	82
10. Perbandingan Angka Kemiskinan Moneter dan Multidimensi Tahun 2016.....	94
11. Bobot Dimensi dan Indikator Kemiskinan Multidimensi.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Perangkap Kemiskinan Menurut Robert Chambers.....	25
2. Kerangka Berpikir.....	55
3. Jumlah Rumah Tangga Miskin Multidimensi di Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	64
4. Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi di Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	65
5. Jenis Kepemilikan Rumah di Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	68
6. Sumber Air Bersih yang Digunakan di Kota Yogyakarta 2016.....	69
7. Persentase Konsumsi Kalori Rumah Tangga dan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	70
8. Jenis Pendidikan pra sekolah yang Ditempuh di Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	71
9. Jenis Penggunaan Sanitasi di Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	72
10. Gambar 10. Jenis Bahan Bakar Memasak di Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	73
11. Proporsi Penduduk dan Rumah Tangga Melek Huruf di Kota Yogyakarta 2016	74
12. Proporsi Penduduk dan Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Yogyakarta 2016.....	74
13. Jenis Penolong Persalinan di Kota Yogyakarta Tahun 2016	75
14. Jenis Sumber Penerangan di Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	76
15. Jenis Atap Rumah di Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	77
16. Jenis Dinding Rumah di Kota Yogyakarta Tahun 2016	77
17. Jenis Lantai Rumah di Kota Yogyakarta Tahun 2016	78
18. Perbandingan Antara Tingkat Kemiskinan Moneter dengan Multidimensi di Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	79
19. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Moneter Kota Yogyakarta Tahun 2010, 2013, 2015, dan 2016.....	80
20. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Indikator di Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	83
21. Jumlah Jenis Rumah yang Ditempati Penduduk yang Tidak Memiliki Rumah di Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	85
22. Luas Rumah yang Disewa Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2016	86
23. Jumlah Pengeluaran Rumah Tangga di Kota Yogyakarta Tahun 2016 yang Tidak Memiliki Rumah Sendiri	87
24. Perbandingan Antara Tingkat Kemiskinan Moneter dengan Multidimensi di Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	94
25. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Moneter Kota Yogyakarta Tahun 2010, 2013, dan 2015.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lampiran Penghitungan Kemiskinan Multidimensi	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada satu pun negara yang diproklamasikan tanpa cita-cita abadi yang luhur, karena justru di setiap cita-cita itulah terletak kepentingan bersama yang diikat secara kuat untuk menggapai tujuan (Yustika, 2002). Begitu pula dengan Indonesia yang didirikan oleh *founding fathers* 72 tahun lalu. Selama masa tersebut banyak hal yang dilakukan oleh negara untuk menunaikan cita-cita kemerdekaan yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum.

Maju dalam hal tersebut mengandung makna terjadi peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini dapat diterjemahkan sebagai peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, bangsa ini harus lebih sejahtera dibandingkan pada masa kolonial. Kesejahteraan umum juga berarti tidak boleh ada manusia Indonesia yang lebih sejahtera secara mencolok dibandingkan dengan manusia Indonesia lain. Karenanya, pembangunan yang diadakan oleh negara harus merata dan tidak menyebabkan timbulnya golongan kaya dan miskin.

Pemerintah sangat sadar bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam upaya mencapai cita-cita bangsa yang adil dan makmur. Mereka berusaha keras untuk mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi upaya yang dilakukan pemerintah menemui kesulitan dalam beberapa tahun belakangan.

Pada tahun 2005-2010, penduduk miskin berhasil diturunkan rata-rata 816 ribu jiwa per tahun. Akan tetapi pada periode 2010-2015, hanya 486 ribu penduduk berhasil keluar dari kemiskinan tiap tahunnya. Per tahun 2015, masih ada 28,59 juta penduduk miskin di Indonesia (Iryanti, 2016:2)

Jumlah 28,59 juta penduduk miskin setara dengan 11,13% penduduk miskin. Padahal pada tahun 2000 pemerintah bersama negara lain di seluruh dunia menyepakati agenda pembangunan yang disebut dengan *Millenium Development Goals* (MDGs). Dalam MDGs disebutkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan menjadi 7,5% sesuai dengan pada tahun 2015. Artinya, target pengurangan kemiskinan sesuai MDGs tidaklah tercapai.

Dari data di atas terlihat bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Menurut Setiadi dan Kolip, kesulitan dalam mengentaskan kemiskinan dikarenakan kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri, sehingga program penanggulangan kemiskinan tidak didasarkan pada penyebabnya berbeda-beda secara lokal. Data untuk menanggulangi kemiskinan secara makro bersumber dari Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (Ras, 2013:57).

Pendekatan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik dalam mengukur kemiskinan sering disebut dengan pendekatan ekonomi. Pendekatan ini hanya melihat kemiskinan dari satu indikator saja yakni pengeluaran per kapita per bulan.

Pendekatan ekonomi juga banyak diterapkan dalam mengukur kemiskinan di dunia. Selama ini indikator secara global yang banyak digunakan dalam menghitung angka kemiskinan adalah melalui pendekatan moneter seperti garis kemiskinan dengan batas USD. 1.25 dan USD. 1.25 *Purchasing Power Parity*.

Ekonom peraih hadiah nobel, Amartya Sen pada tahun 1987 mengkritik pendekatan kemiskinan dengan menggunakan analisis moneter. Menurut Sen, pendekatan tersebut hanya memotret sebagian kecil dari begitu besarnya persoalan kemiskinan. Menurut Sen, masalah kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*), penghasilan atau konsumsi tapi terdapat dimensi yang lebih luas dari kondisi kemiskinan (Perkumpulan Prakarsa, 2013:2)

Senada dengan Sen, Tjiptoherianto (1996:73) juga berpendapat bahwa masalah kemiskinan tidak bisa diukur dengan pendekatan ekonomi semata. Selama ini, pengukuran kemiskinan menggunakan pendekatan ekonomi memang lebih banyak digunakan. Namun masalah kemiskinan jauh lebih luas dari masalah ekonomi saja. Persoalan kemiskinan juga terkait dengan pola pikir masyarakat seperti sikap-sikap apatis, pasrah diri, ketidakberdayaan yang telah mengurung kehidupan masyarakat miskin.

Selain itu pengukuran kemiskinan menggunakan pendekatan ekonomi tidak dapat mengakomodasi fasilitas pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, air minum, listrik, jalan, dan sebagainya dalam memenuhi kebutuhan penduduk miskin. Padahal fasilitas sosial tersebut sangat

berpengaruh dalam memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat miskin Tjiptoherianto (1996:73).

Menurut Nolan dan Whelan (2011) pengukuran kemiskinan secara non moneter dapat memperlihatkan secara konkrit apa yang disebut dengan kemiskinan itu sendiri. Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan pendekatan moneter menunjukkan kegagalan dalam mengidentifikasi orang miskin dan indikator non moneter dapat diandalkan untuk memperlihatkan siapa yang disebut orang miskin (Alkire *et all*, 2015:8-9).

Studi yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa pengukuran kemiskinan secara moneter sering menemukan hasil berbeda bila dibandingkan dengan kondisi yang dialami oleh penduduk miskin. Kaztman (1989) menemukan bahwa 13% rumah tangga di Montevideo Uruguay adalah penduduk dengan pendapatan miskin namun mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan 7,5% berada dalam kasus sebaliknya, mereka merupakan penduduk tidak miskin namun tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ruggeri Laderchi (1997) menyimpulkan berdasarkan data di Chili bahwa pengukuran kemiskinan pendapatan itu sendiri tidak menyampaikan semua informasi yang menarik jika tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemiskinan. Stewart, Saith, dan Harriss-White (2007) menemukan bahwa 53% anak-anak kurang gizi di India dalam penelitian tersebut tidak tinggal di rumah tangga yang mengalami kemiskinan pendapatan dan 53% anak-anak yang tinggal di rumah tangga berpenghasilan miskin tidak kekurangan gizi (Alkire *et all*, 2015:10).

Sebuah pendekatan baru dalam pengukuran kemiskinan diperkenalkan oleh *United National Development Program* (UNDP) dan *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI). Sejak tahun 2010, UNDP dan OPHI menyepakati sebuah inisiasi pengukuran kemiskinan baru melalui *Multidimensional Poverty Index* (MPI) yang dimuat dalam HDR 2010.

Pengukuran kemiskinan secara multidimensi sesuai dengan target MDGs yang ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah berakhirnya MDGS, negara-negara anggota PBB menyepakati target baru bernama SDGs yang memuat pencapaian yang ingin dicapai pada tahun 2030 nanti. Aspek yang terkandung dalam SDGs salah satunya adalah melakukan pengurangan terhadap kemiskinan multidimensi.

Pemerintah juga memiliki target untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dalam rencana tersebut telah diuraikan target yang hendak dicapai dan telah disahkan dalam Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pengukuran kemiskinan secara multidimensi dapat melihat kemiskinan secara menyeluruh dan mampu menghasilkan kebijakan pemberantasan kemiskinan tepat sasaran. Pendekatan ini juga dapat dijadikan standar evaluasi mengenai program yang telah dilakukan pemerintah.

Fenomena yang dialami oleh Indonesia dalam mengurangi penduduk miskin juga terjadi di Kota Yogyakarta. Dari tahun ke tahun, angka kemiskinan hanya turun sedikit. Angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun

2013 sebesar 37.400 atau 9,38% dan jumlahnya menjadi turun menjadi 35.600 jiwa atau 8,67% di tahun berikutnya. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta malah naik menjadi 36.000 atau 8,75% dari jumlah penduduk.

Permasalahan kemiskinan di Kota Yogyakarta memang cukup kompleks. Dengan luas wilayah hanya 3250 hektar, Yogyakarta merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia. Kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 mencapai 12.699 jiwa per km² (BPS, 2017:67). Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran WHO. Menurut WHO, kepadatan penduduk normal adalah 9.600 jiwa per km² (Abraham *et all*, 2014: 1). Banyaknya penduduk yang mendiami Kota Yogyakarta akan mendorong timbulnya pemukiman kumuh bagi mereka yang tidak bisa mengakses hunian layak.

Data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan bahwa masih banyak pemukiman kumuh di kota Yogyakarta. Menurut data Pemkot, pada tahun 2016 terdapat 177ha atau 6,86% wilayah kota Yogyakarta yang tergolong kawasan kumuh. Angka ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2012 di mana terdapat 89,88ha (2,77%) wilayah kumuh di Kota Yogyakarta. Dengan demikian, dalam periode tersebut luas wilayah kumuh di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dua kali lipat.

Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Triyastuti Setianingrum (2016), menyebutkan kampung-kampung kumuh tersebut tersebar hampir di seluruh kelurahan, seperti daerah Gedongkiwo, Sorosutan, Suryatmajan, Prawirodirjan, Pringgokusuman, Kricak, Karangwaru, Ngupasan, dan lainnya (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/23/ofh9yk335-luas-lahan-permukiman-kumuh-diy-capai-2649-hektare>).

Sementara wilayah dengan kawasan permukiman kumuh paling luas berada di Kecamatan Umbulharjo seluas 75,2ha, Kecamatan Tegalrejo 35,18ha, dan Kecamatan Mantriweron 20,65ha. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa permukiman di kawasan tepi sungai, terutama yang berada di perkotaan masih memerlukan perhatian yang lebih serius karena permukiman di kawasan tersebut identik dengan hunian yang padat, sarana sanitasi dan sumber air bersih yang terbatas, akses dan sarana jalan yang tidak memadai, hingga status tanah yang bermasalah.

Kekumuhan wilayah salah satunya berdampak pada jumlah rumah tidak layak huni. Keberadaan rumah tidak layak huni ini banyak dijumpai di wilayah sepanjang tepian sungai, baik Sungai Code, Winongo, maupun Gajahwong, kemudian banyak juga yang berlokasi di sepanjang rel kereta api, kolong-kolong jembatan, atau terminal. Pada tahun 2016, jumlah rumah tidak layak huni mencapai 2.781 unit (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2017:114)

Dari pemaparan Setianingrum di atas, diketahui bahwa permasalahan kemiskinan di Kota Yogyakarta tidak terkait pada persoalan ekonomi semata.

Adanya masalah dalam hal penyediaan air bersih, sanitasi, dan kekumuhan wilayah menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang sifatnya multidimensi.

Keberadaan Kota Yogyakarta dengan segala permasalahannya membuat persoalan kemiskinan menjadi lebih kompleks. Perhitungan kemiskinan dengan menggunakan *Multidimensional Poverty Index* (MPI) dinilai cocok diterapkan di Kota Yogyakarta karena metode perhitungan ini lebih komprehensif.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengamini bahwa masalah kemiskinan tidak hanya terkait dengan persoalan ekonomi semata. Dalam Perda Nomor 11 tahun 2017 disebutkan bahwa kecenderungan kemiskinan di Kota Yogyakarta terjadi karena kurangnya kesempatan, keterbatasan kepemilikan aset/barang, serta akses terhadap pelayanan sosial.

Rendahnya tingkat pendapatan keluarga miskin tidak lepas dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh kepala keluarga dan anggotanya, dan akan menjadi lebih parah ketika kepala keluarga atau anggotanya tidak bekerja. Sementara itu, kepemilikan aset juga terbatas, yang berarti orang miskin akan menempati kawasan kurang layak huni dengan fasilitas yang terbatas sehingga dapat menimbulkan masalah kesehatan.

Pemerintah Kota Yogyakarta menginginkan warganya agar dapat hidup nyaman. Dalam Visi pemerintahan terpilih tahun 2017-2022, Pemerintah ingin meneguhkan kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat

dengan berpijak pada nilai keistimewaan. Yang dimaksud kota nyaman huni adalah kota dengan: 1. kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta yang tinggi di atas rata-rata nasional, yang tercermin dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. 2. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang layak dan memadai bagi aktifitas warga. 3. Pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat melampaui standar pelayanan minimal. 4. Berkembangnya perekonomian yang mampu menggerakkan pembangunan kota dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 5. Memberikan ruang yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai dan aktifitas sosial dan budaya sehingga mampu meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Dari pemaparan di atas terlihat mengenai permasalahan kemiskinan yang bersifat multidimensi di Kota Yogyakarta. Kemiskinan tidak terkait dengan persoalan ekonomi semata namun juga mengalami keterkaitan dengan aspek pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup. Penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana kondisi kemiskinan multidimensi di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini akan mengambil judul “Analisis Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi berbagai masalah mengenai kemiskinan multidimensi di Kota Yogyakarta yaitu:

1. Kemiskinan masih banyak dijumpai di Indonesia.

2. Upaya untuk mengurangi penduduk miskin mengalami perlambatan pada tahun 2010-2015.
3. Target penurunan jumlah penduduk miskin sesuai dengan MDGs 2015 sebesar 7,5% tidak tercapai
4. Sulitnya mengurangi kemiskinan tidak lepas dari beragamnya definisi dan standar pengukuran kemiskinan.
5. Pendekatan moneter dalam melihat kemiskinan dikritik oleh beberapa ahli.
6. Kemiskinan merupakan masalah yang harus didalami secara multidimensi, tidak hanya persoalan ekonomi semata.
7. Konsep pengukuran kemiskinan secara multidimensi sejalan dengan SDGs 2030 dan RPJMN 2015-2019.
8. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan populasi terpadat di Indonesia.
9. Jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi.
10. Kondisi kemiskinan di Kota Yogyakarta tak lepas dari masalah air bersih, sanitasi, dan kekumuhan wilayah.
11. Metode *Multidimensional Poverty Index* (MPI) lebih komprehensif dalam upaya mengukur kemiskinan di Kota Yogyakarta.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini membatasi pada terjadinya kemiskinan yang terdapat di Kota Yogyakarta, baik kemiskinan moneter maupun multidimensi. Kemiskinan moneter diukur dengan pendekatan garis kemiskinan menurut BPS. Kemiskinan multidimensi diukur

berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh perkumpulan Prakarsa dimana indikator yang digunakan adalah pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi kemiskinan moneter di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana kondisi kemiskinan multidimensi di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana perbandingan antara kemiskinan moneter dan multidimensi di kota Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi kemiskinan moneter di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui kondisi kemiskinan multidimensi di kota Yogyakarta.
3. Mengetahui perbandingan antara kemiskinan moneter dan multidimensi di Kota Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya.

- b. Sebagai tambahan bahan pustaka bagi mahasiswa yang ingin mengetahui analisis kemiskinan menggunakan pendekatan multidimensi.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi pengambil kebijakan untuk melihat kemiskinan sebagai satu masalah yang sifatnya multidimensi.
- b. Mengetahui sejauh mana keberhasilan program yang dilakukan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Kesejahteraan

Berbicara mengenai kemiskinan tak lepas dari apa yang dimaksud dengan kesejahteraan. R.S Pindyck mengemukakan bahwa kesejahteraan menjadi antitesis dari kemiskinan yang dialami oleh seseorang (Nuryitmawan, 2016:34).

Kaitan kesejahteraan dengan kemiskinan juga tercermin dari pengukuran kesejahteraan menggunakan garis kemiskinan, yaitu dengan standar US\$1 atau US\$2 per kapita per hari. Semakin besar persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan akan mencerminkan semakin rendah taraf sejahtera masyarakat dalam suatu negara (Rahardjo, 2016: xxvi).

Bank Dunia menyatakan bahwa kemiskinan menunjuk situasi pada kekurangan yang nyata dalam kesejahteraan. Oleh karena itu masalah kemiskinan selalu dikaitkan dengan kesejahteraan (Zailani, 2015:27).

Pembukaan UUD 1945 mencantumkan kesejahteraan umum sebagai tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Menurut Dawam Rahardjo (2016: xxxiii) pengertian kesejahteraan umum mengacu pada pengertian utilitarianisme yang mengemukakan bahwa kebenaran ialah *the greatest happiness for the greatest number of people*.

Ahli ekonomi Vilfredo Pareto menyatakan kesejahteraan akan tercapai apabila tercipta situasi optimal. Situasi optimal terjadi apabila tidak ada individu dapat berbuat lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Lebih singkat lagi, pengalokasian sumber daya dikatakan efisien bila kondisi yang dicapai tidak bisa dicapai lebih baik lagi (Deliarnov, 2010:111).

Untuk menilai taraf kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara, dilakukan pengukuran kesejahteraan. Pada tataran global, terjadi perdebatan atas pengukuran kesejahteraan mewakili dua kubu dengan orientasi pembangunan yang berbeda. Kubu pertama menilai kesejahteraan diukur dari PDB dan pendapatan per kapita. Adapun kubu kedua memandang kesejahteraan harus dilihat dari pembangunan manusia (Rahardjo, 2016: xxix).

Konsep mengenai Produk Domestik Bruto berawal dari peristiwa depresi besar yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1929-1931. Saat itu pejabat Amerika Serikat kesulitan untuk mendapatkan data mengenai produksi industri. Akan tetapi data tersebut tidak benar dan membuat pemerintah AS kesulitan untuk menguji kebijakan pemerintah. Pada awal tahun 1930-an, Departemen Perdagangan AS meminta ekonom Simon Kuznetz untuk melakukan pengukuran mengenai pendapatan nasional yang diperoleh AS semasa depresi besar (Fiaramonti, 2017:30-31)

Upaya Kuznetz dalam mengukur pendapatan nasional berlanjut dan pada tahun 1936 diadakan konferensi yang menghasilkan kesepakatan konsep produk nasional bruto (PNB). Pada Tahun 1953, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenalkan standar nasional untuk menghitung neraca nasional yang konsepnya sangat dipengaruhi oleh metodologi yang dikembangkan Kuznetz dan Departemen Perdagangan AS (Fiaramonti, 2017:34).

Pasca dikenalkan oleh PBB. Ekspansi konsep Produk Nasional Bruto (PNB) sangat populer di berbagai negara termasuk negara berkembang. Pada tahun 1991, PNB digantikan dan mulailah kita mengenal konsep Produk Domestik Bruto dan negara-negara di dunia kerap menggunakan hal tersebut sebagai pengukur kesejahteraan (Fiaramonti, 2017:51).

Pandangan kubu kedua ini dipelopori oleh dua orang yakni Mahbub Ul Haq dan Amartya Sen (Rahardjo, 2016:xxix). Ul Haq berpendapat bahwa pembangunan harus bisa mengurangi kekurangan gizi, penyakit, buta huruf, kemelaratan, dan perbedaan (Ul Haq, 1983:56).

Amartya Sen menyatakan bahwa asal sejahteranya individu ialah kemampuan untuk bisa berfungsi layak dalam masyarakat. Kondisi sejahtera yang dimaksud adalah saat terpenuhinya kebutuhan dasar akan gizi, pendidikan, perumahan, penghasilan, kebebasan dalam memilih,

dan mendapat perlindungan dari resiko yang mengancam hidupnya Nuryitmawan (2016: 34).

Upaya Sen dan Ul Haq untuk menolak PDB sebagai tolok ukur kesejahteraan dilakukan dengan merancang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990. IPM memuat 3 hal yakni pendapatan per kapita, usia harapan hidup, dan angka partisipasi sekolah sebagai alternatif untuk melihat kesejahteraan. IPM memuat pemikiran bahwa rakyat merupakan kekayaan sebenar-benarnya dari sebuah negara dan pembangunan harus membuat lingkungan yang memungkinkan penghuninya untuk menikmati hidup panjang, sehat, dan berdaya cipta (Fiaramonti, 2017: 127-129).

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa sejak dulu terjadi perdebatan mengenai pengukuran kesejahteraan. Di satu pihak, kesejahteraan hanya dinilai dari aspek ekonomi semata. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa kesejahteraan diukur dengan tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi, namun terkait dengan hal lain seperti pendidikan dan kesehatan.

2. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Terdapat berbagai pengertian mengenai kemiskinan. Masing-masing ahli melukiskan masalah kemiskinan secara berbeda. Hal ini berkaitan dengan beragamnya pendekatan yang digunakan oleh para ahli dalam memahami kemiskinan.

Levitan mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan bahan dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai hidup layak (Limbong, 2011: 209). Schiller menyatakan kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapat barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas (Suyanto, 2013: 2).

Kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar berkaitan dengan keadaan ekonomi masyarakat itu sendiri. Subandi (2014: 77-78) menyatakan jika kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi dimana masyarakat berada pada tingkat ekonomi yang lemah, ditambah kebijakan pemerintah yang sifatnya jangka pendek sehingga belum dapat menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat miskin.

Kartasmita (1996: 234) menyebut kemiskinan sebagai masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, lalu meningkat menjadi kesenjangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan dalam berusaha dan mengakses kegiatan ekonomi sehingga menimbulkan ketertinggalan dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Bappenas dalam Arsyad (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang ataupun kelompok orang untuk menyelenggarakan hidup sampai taraf yang manusiawi.

Lembaga Penelitian SMERU menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan memperbaiki kondisi hidupnya. Namun kemiskinan bukan hanya berkutat pada kebutuhan material dasar saja. Kemiskinan juga memiliki kaitan erat dengan beberapa dimensi lain kehidupan manusia, misal kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan, dan peranan sosial (SMERU, 2001:1).

Suyanto (2013) mendefinisikan kemiskinan bukan hanya fenomena ekonomi yang berkaitan dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun esensi kemiskinan menyangkut kemungkinan orang untuk mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya.

Menurut Chambers (1987:145-147) inti dari masalah kemiskinan adalah mata rantai yang kadang disebut lingkaran setan, sindrom kemiskinan, ataupun perangkat kemiskinan. Mata rantai yang membentuk perangkat kemiskinan itu terdiri dari: kemiskinan itu sendiri, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan.

Adapun John Friedman mengemukakan bahwa kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial yang dimaksud adalah: modal produktif/aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik untuk mencapai kepentingan bersama, network/jaringan sosial untuk memperoleh

pekerjaan, barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna untuk kehidupan (Suyanto, 2013,2-3)

Limbong (2011: 211) menyatakan bahwa kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak dan kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang disebabkan oleh sampingan dari kebijakan yang tidak dapat dihindari, merupakan akar kemiskinan dan mengakibatkan ketidakberdayaan penduduk, sehingga membawa gejala kemiskinan yang bersifat multidimensi.

Dari paparan di atas, dapat dicapai kesimpulan yaitu kemiskinan adalah suatu keadaan dimana individu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang mengakibatkan ia tidak mampu mengakumulasi aset dan mengakses layanan sosial.

b. Macam-macam Kemiskinan

Kemiskinan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. ukuran kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar dalam hal ini adalah kebutuhan yang meliputi konsumsi pribadi dan kebutuhan pelayanan sosial. Kemiskinan kedua yaitu kemiskinan relatif, di

mana tinggi rendahnya tingkat kemiskinan ditentukan oleh lingkungan sekitarnya (Arsyad, 2010).

Sedangkan menurut Mochtar Mas'oed kemiskinan jika ditinjau dari penyebabnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah timbul akibat kelangkaan SDA. Kondisi tanah yang tandus, tidak tersedianya irigasi, dan langkanya prasarana lain merupakan penyebab utama kemiskinan. Sedangkan kemiskinan buatan terjadi karena munculnya kelembagaan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi secara merata (Mas'oed, 2003:138).

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi kemiskinan alami (kultural) dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alami berkaitan dengan kepemilikan faktor produksi, tingkat produktivitas, dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Sedangkan kemiskinan struktural merupakan masalah yang timbul karena strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Subandi, 2014:78).

Kemiskinan buatan kerap diidentikkan dengan pengertian kemiskinan struktural. Selo Soemardjan menganggap bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut, sehingga membuat masyarakat tersebut tidak mampu menikmati

sumber pendapatan yang tersedia (Arsyad:, 2010:301). Sedangkan menurut Limbong (2011:221) kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang terorganisasi sehingga terjadi proses pemiskinan rakyat.

Ciri utama kemiskinan struktural adalah tidak terjadinya mobilitas sosial vertikal, walaupun ada sifatnya lamban sekali. Masyarakat miskin akan tetap miskin, sedangkan golongan kaya akan tetap menikmati kekayaannya. Menurut pendekatan struktural, faktor penyebabnya adalah terletak pada kungkungan struktural yang membuat orang miskin menjadi malas untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Suyanto, 2013: 11)

Jeffrey D Sachs membagi kemiskinan menjadi 3 kategori yaitu kemiskinan ekstrim (absolut), kemiskinan moderat, dan kemiskinan relatif. Kemiskinan ekstrim adalah kondisi dimana rumah tangga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam mempertahankan hidup. Kondisi rumah tangga yang mengalami kemiskinan ekstrem ditandai dengan kelaparan kronis, tidak mampu mengakses layanan kesehatan, tidak memiliki sumber air dan sanitasi yang baik, tidak dapat menjangkau layanan pendidikan, dan mungkin kekurangan perlindungan dasar. Sedangkan kemiskinan moderat merujuk kondisi dimana rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar saja. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan pendapatan rumah tangga yang berada

di bawah proporsi rata-rata pendapatan nasional (Limbong, 2011: 212).

c. Penyebab Kemiskinan

Terdapat banyak hal yang membuat orang menjadi jatuh miskin. Namun tak ada jawaban yang mampu untuk menjelaskan mengapa seseorang menjadi miskin secara sekaligus. Fenomena ini ditunjukkan dengan beragamnya pendapat yang mencoba mencari sebab dari kemiskinan. Perbedaan tersebut dikarenakan terdapatnya perbedaan wilayah, waktu, maupun kondisi tertentu saat mencoba mencari penyebab kemiskinan.

Sharp, et al dalam Subandi (2014:78) mengidentifikasi 3 penyebab kemiskinan. Menurut mereka, 3 hal tersebut adalah:

- 1) Secara mikro, kemiskinan timbul karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang membuat distribusi pendapatan menjadi timpang
- 2) Munculnya kemiskinan disebabkan karena perbedaan kualitas SDM
- 3) Adanya perbedaan dalam mengakses modal.

Menurut lembaga penelitian SMERU, kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai hal. Penyebab kemiskinan terdiri dari:

- 1) Gagal dalam perolehan hak milik, terutama tanah dan modal;

- 2) Ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana yang jumlahnya terbatas;
- 3) Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
- 4) Terdapat perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
- 5) Adanya perbedaan SDM dan perbedaan antar sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
- 6) Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;
- 7) Tidak adanya *good governance*
- 8) Pengelolaan SDA yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan (SMERU, 2001:4).

Sedangkan menurut ekonom Dorodjatun Kuntjara Jakti kemiskinan disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan dampak pada munculnya kemiskinan, terutama kemiskinan perkotaan (Limbong, 2011: 216)

Ekonom Michael Todaro juga memiliki pendapat mengenai sebab kemiskinan. Todaro berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor berikut:

- 1) Perbedaan letak geografis, penduduk, dan pendapatan

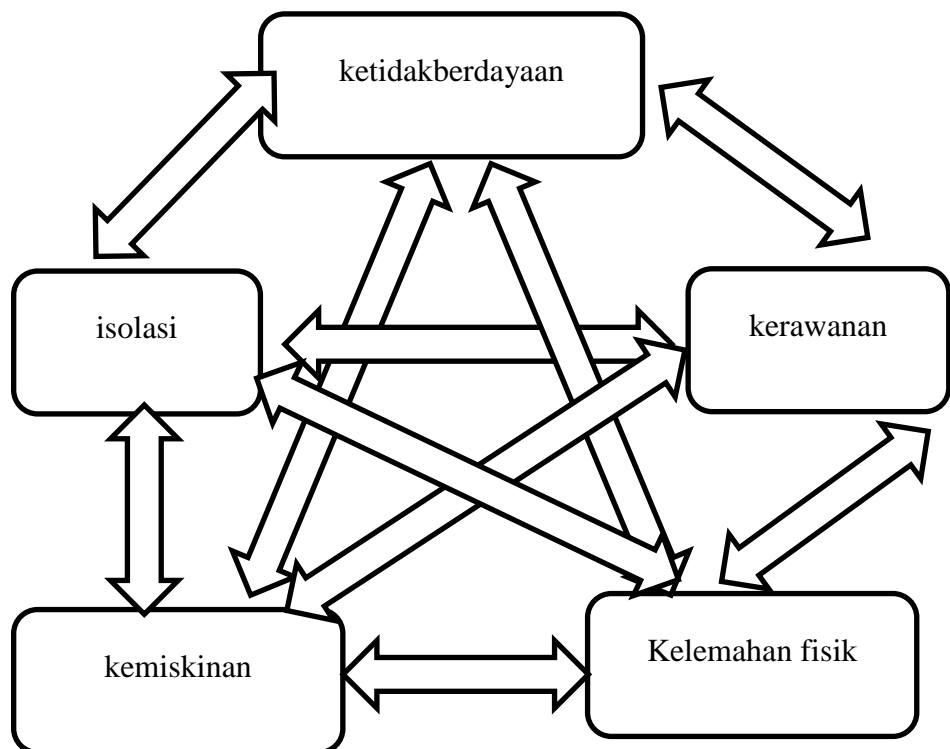
- 2) Perbedaan sejarah, terutama penjajahan oleh negara yang berlainan
- 3) Perbedaan SDA dan SDM
- 4) Perbedaan negara dan swasta
- 5) Perbedaan struktur industri
- 6) Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain
- 7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik, dan kelembagaan dalam negeri (Limbong, 2011: 217-218)

Sedangkan menurut Limbong (2011: 218-219) penyebab kemiskinan meliputi: kegagalan dalam memiliki aset, letak geografis yang kurang mendukung, kerentanan dan ketidakpastian dalam menghadapi goncangan, kekurangan jumlah maupun kualitas dalam hal sumber daya, tidak memiliki representasi dalam institusi negara dan masyarakat, dan siklus yang berulang sehingga timbul perasaan rendah diri, kurangnya motivasi, bahkan depresi dari kaum miskin.

Dari beberapa paparan ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa penyebab kemiskinan adalah gagal dalam mencukupi kebutuhan dasar, gagal dalam kepemilikan aset, dan perbedaan kualitas sumber daya manusia.

Ilmuwan Robert Chambers menyajikan deskripsi mengenai golongan masyarakat miskin. Chambers mengemukakan konsep perangkat kemiskinan. Menurut Chambers, terdapat 5 hal yang

membuat seseorang menjadi miskin. Kelimanya adalah kemiskinan itu sendiri, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan (Chambers, 1987: 141-143).



Gambar 1. Perangkap Kemiskinan menurut Robert Chambers

Chambers menyebut mata rantai di atas sebagai perangkap kemiskinan. Menurut Chambers, akan ada 20 pola kemungkinan

hubungan kausal yang dapat membentuk jaringan yang mampu memerangkap orang menjadi miskin. Secara lengkap, kelima faktor tersebut adalah:

- 1) Kemiskinan, adalah faktor yang paling penting. Kemiskinan mengakibatkan kelemahan jasmani karena kekurangan makan, yang pada gilirannya menghasilkan ukuran tubuh yang lebih kecil, kekurangan gizi membuat daya tahan tubuh menjadi rendah sehingga mudah terserang penyakit, padahal tidak memiliki biaya untuk berobat. Keadaan seperti ini membuat orang tersisih dan akhirnya menjadi rentan. Pada akhirnya orang miskin menjadi tidak berdaya karena kehilangan kesejahteraan dan memiliki kedudukan yang rendah.
- 2) Kelemahan jasmani, mendorong kemiskinan melalui berbagai cara: tingkat produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah. Tubuh yang lemah juga membuat seseorang menjadi tersisih karena ia tidak mampu mengikuti pertemuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Jasmani yang lemah memperpanjang kerentanan karena terbatasnya kemampuan untuk mengatasi krisis. Tubuh yang lemah juga membuat orang merasa tidak berdaya, kekurangan waktu untuk memperjuangkan hak politiknya karena orang yang kelaparan tidak akan berbuat macam-macam.

- 3) Isolasi, karena pendidikan dan tempat tinggal yang jauh. Kondisi ini turut menopang terjadinya kemiskinan. Hal ini disebabkan bantuan dan pelayanan pemerintah tidak dapat menjangkau mereka. Orang yang buta huruf akan jauh dari akses ekonomi.
- 4) Kerentanan, faktor ini berkaitan dengan kemiskinan karena orang terpaksa menjual kekayaan mereka, berkaitan pula dengan kelemahan jasmani untuk menangani kelemahan darurat, berkaitan dengan isolasi berupa upaya mengasingkan diri, dan ketidakberdayaan dicerminkan dengan bergantung pada orang lain.
- 5) Ketidakberdayaan, pada akhirnya mendorong proses pemiskinan. Orang yang tidak berdaya sulit memiliki akses terhadap bantuan maupun pendidikan. Hal ini akan membuat orang menjadi semakin terisolir dari bantuan pemerintah yang membuatnya rentan.

d. Ciri-Ciri Kemiskinan

Beberapa ahli mengemukakan ciri-ciri kemiskinan. Ciri-ciri kemiskinan menurut Gunnar Myrdal dalam Prayitno & Arsyad (1987: 36-37) adalah:

- 1) Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan dan tidak memiliki faktor produksi sendiri, sehingga membuat kemampuan menghasilkan pendapatan menjadi terbatas.

- 2) Mereka pada umumnya tidak memiliki kekuatan untuk memperoleh aset dengan kekuatan sendiri. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan maupun modal usaha.
- 3) Tingkat pendidikan yang relatif rendah, tidak tamat Sekolah Dasar. Ketidakmampuan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan waktu yang tersedia digunakan untuk bekerja sehingga waktu untuk belajar menjadi tidak ada.
- 4) Banyak penduduk miskin yang berada di pedesaan dan memiliki tanah garapan kecil atau bahkan tak memiliki sama sekali. Pekerjaan mereka umumnya buruh tani ataupun pekerja kasar di luar sektor pertanian.
- 5) Berusia muda namun tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang cukup.

Lembaga Penelitian SMERU menyatakan bahwa rumah tangga miskin memiliki ciri berikut: luas rumah kurang dari 8m² per kapita, lantai rumah berupa tanah, sumber air bersih mengandalkan air hujan dan sumber yang tidak terlindung, tidak memiliki jamban/sanitasi, tidak mempunyai aset, tidak pernah /melakukan kegiatan sosial, tidak mampu untuk membeli lauk pauk yang bervariasi, dan tidak pernah membeli pakaian (SMERU,

2001:6) Sedangkan ciri-ciri masyarakat miskin menurut Fernandez dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

- 1) Aspek politik: tidak mempunyai akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya
- 2) Aspek sosial: tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada
- 3) Aspek ekonomi: rendahnya kualitas SDM, termasuk rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, keterampilan yang membuat rendah penghasilan. Rendahnya kepemilikan atas aset fisik, termasuk air bersih dan penerangan
- 4) Aspek budaya atau nilai: terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM, etos kerja yang rendah, pikiran yang pendek dan mudah menyerah (Arsyad, 2010:300).

Bank Dunia (1980) menyatakan bahwa kemiskinan sendiri memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar para pengambil kebijakan dapat membuat keputusan yang tepat dalam pemberantasan kemiskinan. Aspek tersebut antara lain:

- 1) Kemiskinan bersifat multidimensi. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia yang sifatnya beraneka ragam. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasi dalam bentuk kurang gizi dan air, perumahan yang tidak sehat, pelayanan kesehatan yang kurang, dan pendidikan yang kurang baik.

- 2) Aspek kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemajuan ataupun kemunduran satu aspek akan mempengaruhi aspek lain.
- 3) Yang disebut miskin adalah manusianya, baik secara individu maupun kolektif, bukan wilayahnya (Prayitno, 1987:36)

Sedangkan MG Quibria dalam Prayitno & Santosa (1996:102) menyatakan jika kemiskinan dicirikan sebagai berikut: kemiskinan lebih banyak dijumpai di daerah desa dibanding dengan wilayah kota, kemiskinan memiliki korelasi positif dengan jumlah anggota keluarga namun berkorelasi negatif dengan jumlah pekerja dalam keluarga, rendahnya kepemilikan aset yang dimiliki oleh keluarga miskin, sumber utama penghasilan keluarga miskin adalah bertani, kemiskinan terkait dengan masalah budaya yang dinamis.

3. Kemiskinan Moneter

Kemiskinan moneter di Indonesia diukur dengan menggunakan standar dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS, kemiskinan berarti ketidakampuan dalam memenuhi standar kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan (Khomsan et al, 2015:12).

Berdasarkan definisi di atas, cara mengukur kemiskinan menggunakan Indeks Perkepala (*Head Count Index*), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu

konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu (Bappeda Provinsi DIY, 2015).

Cara menetapkan garis kemiskinan adalah dengan melihat besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan. Kebutuhan pangan dipatok pada angka 2.100 kkal/kapita/hari sesuai anjuran Widyakarya Pangan dan Gizi 1988 (Khomsan et al, 2015:13).

Sementara aspek non makanan yang diukur dari pengeluaran pada perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa lainnya. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri atas dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan bukan makanan (Bappeda DIY, 2015).

Menurut BPS, ada beberapa tahapan dalam menghitung jumlah penduduk miskin moneter. Tahap pertama dalam menghitung garis kemiskinan adalah menentukan kelompok referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS dihitung berdasar garis kemiskinan periode sebelumnya yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_j = \sum_{i=1}^{52} P_{jk} Q_{jk} = \sum_{i=1}^{52} V_{jk}$$

Dimana:

GKM_j = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori).

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j.

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

J = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$HK_j = \frac{\sum_{i=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{i=1}^{52} K_{jk}}$$

HK_j = Harga rata-rata kalori di daerah j

K_{jk} = Kalori dari komoditi k di daerah j

GKM_j disetarakan dengan 2100 kilo kalori dengan cara mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi.

$$F_j = HK_j * 2100$$

F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

Nilai kebutuhan minimum perkomoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran

komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_j = \sum_{i=1}^n r_{kj} \cdot V_{kj}$$

Dimana:

$GKNM_p$ = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p ($GKNM_p$).

V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPKKD 2004).

k = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

Setelah mengetahui garis kemiskinan, maka dapat diketahui persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (GK). Merupakan besaran angka penduduk yang penghasilannya atau konsumsinya di bawah garis kemiskinan, yaitu kelompok populasi yang tidak mampu

membeli satu paket bahan kebutuhan pokok. Cara menghitung penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah sebagai berikut:

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{z-y_i}{z} \right\}^\alpha$$

Dimana:

$A = 0$

Z = Garis Kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

4. Kemiskinan Multidimensi

a. Pengertian Kemiskinan Multidimensi

Pengukuran pendekatan dengan kemiskinan multidimensi muncul karena adanya kritik terhadap pendekatan ekonomi semata dalam mengukur kemiskinan. Konsep ini pada mulanya dikemukakan oleh Amartya Sen yang menyatakan bahwa kemiskinan harus dilihat dari berbagai dimensi (Perkumpulan Prakarsa, 2013: 1). Tidak hanya Amartya Sen, aspek multidimensi dalam persoalan kemiskinan juga dikemukakan oleh Bank Dunia (1980); Arsyad (2010); dan Limbong (2011).

Selama ini kemiskinan cenderung diukur hanya dengan satu indikator saja. Indikator tersebut bisa berupa pendapatan, konsumsi,

pendapatan per kapita, untuk menunjukan level deprivasi. Pengukuran seperti inilah yang memisahkan kemiskinan baik secara absolut maupun relatif (Wardhana, 2010: 16)

Tentu saja pengukuran kemiskinan tersebut memiliki kekurangan. Sen pada tahun 1992 menyatakan telah terjadi konsesus bahwa terdapat ketidakcukupan dalam pengukuran kemiskinan berdasarkan pendapatan (Alkire & Santos, 2013: 239).

Keterbatasan ini membuat timbulnya perkembangan metodologi untuk mengukur kemiskinan bukan hanya satu dimensi, melainkan multidimensi. Beberapa metode untuk pengukuran kemiskinan multidimensi diperkenalkan. Salah satu metodenya adalah metode Alkire-Foster (Alkire & Santos, 2013: 240)

Metode ini diperkenalkan oleh Sabine Alkire dan James Foster, peneliti dari *Oxford Poverty & Human Development Initiative*. Metode Alkire Foster mengidentifikasi si miskin berdasarkan dari deprivasi yang dialami oleh si miskin. Informasi tersebut akan membuat kemiskinan dapat dipecah (misal berdasarkan letak geografis, etnis, gender, maupun kelompok sosial lain) untuk mengungkapkan bagaimana orang-orang miskin (OPHI, 2015: 1). Indeks kemiskinan multidimensi merupakan alat ukur kemiskinan secara menyeluruh yang memiliki manfaat:

- 1) Menambah dan membandingkan alat ukur kemiskinan yang selama ini digunakan dalam mengambil kebijakan yaitu indikator pendapatan.
- 2) Memantau tingkat kemiskinan dan komposisi kemiskinan serta pengurangan kemiskinan dalam waktu tertentu
- 3) Mengevaluasi dampak dari program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.
- 4) Memetakan kondisi riil dari kemiskinan terhadap semua aspek (multidimensi) seperti kesehatan, pendidikan, dan standar kualitas hidup.
- 5) Mengidentifikasi jebakan kemiskinan dan kemiskinan kronis.
- 6) Membandingkan kondisi kemiskinan dari berbagai aspek seperti kewilayahan, kelompok etnis, gender, rumah tangga, dan lainnya (Prakarsa, 2013)

Metode ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan. Alkire dan Seth (2009) menyebutkan keunggulan metode ini di antaranya:

- 1) cocok dan tepat diterapkan pada data ordinal atau data yang bersifat kategorik;
- 2) fokus pada kemiskinan dan deprivasi, memperlakukan setiap dimensi secara independen terhadap dimensi lain tanpa mengasumsikan substitutabilitas antardimensi;
- 3) fleksibel untuk menerapkan pembobot yang setimbang atau berbeda pada dimensi yang berbeda tergantung pada kepentingan relatifnya;

- 4) robust dalam mengidentifikasi individu termiskin dari penduduk miskin dengan menaikkan aggregate *cut off* point;
- 5) informatif bagi kebijakan karena mampu menunjukkan dimensi apa yang dominan mempengaruhi kemiskinan multidimensi pada wilayah tertentu ataupun pada kelompok penduduk tertentu.

b. Pengukuran Kemiskinan Multidimensi

Salah satu kelebihan dari pengukuran kemiskinan multidimensi adalah adanya fleksibilitas mengenai indikator yang digunakan. Indikator tersebut menyesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dialami oleh negara yang bersangkutan.

Sebagai contoh, pengukuran kemiskinan multidimensi di Afrika menggunakan 3 dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. 3 dimensi tersebut memuat 10 indikator yaitu angka kematian bayi, nutrisi, kehadiran dalam sekolah, lama waktu sekolah, listrik, sanitasi, air bersih untuk minum, lantai, bahan bakar yang digunakan, dan kepemilikan aset.

Berbeda dengan Afrika, pengukuran kemiskinan multidimensi di negara Tiongkok menggunakan 9 indikator antara lain kehadiran dalam sekolah, lama waktu sekolah, nutrisi, kematian anak, listrik, sanitasi, air yang digunakan untuk minum, bahan bakar memasak dan kepemilikan aset.

Di Indonesia, MPI dapat dilihat dengan mengukur kemiskinan menggunakan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Pengukurannya menggunakan 11 indikator yang dikembangkan oleh

Perkumpulan Prakarsa. Indikator dikembangkan sesuai dengan SDGs dan RPJMN 2015-2019. Seseorang dinyatakan miskin secara multidimensi apabila tidak mampu mencapai batas perhitungan yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus tertentu. Berikut ini adalah 11 indikator yang digunakan dalam melihat MPI di Indonesia:

1) Sanitasi

Definisi miskin indikator sanitasi adalah rumah tangga yang tidak memiliki sanitasi sendiri dan menggunakan sanitasi selain leher angsa. Acuan global pada indikator sanitasi adalah SDG's *goal* 6 khususnya 6.2. Acuan nasional yang digunakan, yakni RPJMN 2015-2019 buku 1 point 5.4 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat di bidang infrastruktur dasar dan konektivitas, dengan target sanitasi layak meningkat dari 60,9% (2014) menjadi 100% (2019).

2) Air Bersih

Definisi miskin indikator air bersih adalah rumah tangga yang tidak memiliki sumber air bersih bukan dari sumur terlindung, ledeng meteran, ledeng eceran, mata air terlindung dan jarak sumber air dengan *septic tank* lebih dari 10 m. Acuan global pada indikator sanitasi adalah SDGs *goal* 6 khususnya 6.1. Acuan nasional yang digunakan yaitu RPJMN 2015-2019 buku 1 point 5.4 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam

Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat di bidang infrastruktur dasar dan konektivitas, dengan target air bersih layak meningkat dari 70% (2014) menjadi 100% (2019).

3) Penolong Persalinan

Definisi indikator penolong persalinan adalah Proses persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Acuan global indikator ini adalah SDGs *goal* 3 khususnya 3.1 dan 3. Acuan nasional yang dipakai adalah RPJMN 2015-2019 buku 1 point 5.4 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat di bidang infrastruktur dasar dan konektivitas dengan target menurunkan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dari 346 (SP 2010) menjadi 306 (2019) dan Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menurun dari 32 (2012) menjadi 24 (2019). Menurunkan prevelansi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) dari 32,9% (2013) menjadi 28% (2019).

4) Asupan Gizi Balita

Threshold indikator asupan gizi balita ialah balita yang tidak memenuhi asupan karbohidrat 70-220 gr, protein 15-35 gr, lemak 35-62 gr dan energi 637.5-1600 kkal yang disesuaikan dengan kelompok usia 0-5 tahun. Acuan Global indikator ini ialah SDGs *goal* 2 khususnya 2.1 dan 2.2. Acuan nasionalnya

adalah RPJMN 2015-2019 buku 1 point 5.4 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat di bidang infrastruktur dasar dan konektivitas, dengan target menurunkan prevalensi kekurangan gizi anak balita dari 19,6 % di tahun 2015 menjadi 17% pada tahun 2016.

5) Keberlangsungan Pendidikan

Definisi indikator keberlangsungan pendidikan adalah rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah yang tidak menyelesaikan pendidikannya hingga sekolah lanjutan atas. Acuan global pada indikator ini adalah SDGs *goal 4* khususnya 4.1. Acuan nasional, yakni RPJMN 2015-2019 buku 1 point 6.5 mengenai Peningkatan Kualitas Kehidupan Manusia Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan, dengan Target Angka Partisipasi Murni (APM) meningkat dari 55,3% pada tahun 2014 menjadi 67,5% di tahun 2019.

6) Melek Huruf

Definisi indikator melek huruf adalah rumah tangga yang memiliki anggota keluarga usia produktif yang tidak melek huruf. Acuan global indikator ini adalah SDGs *goal 4* khususnya 4.6. Acuan nasional, yakni RPJMN 2015-2019 buku 1 point 5.4 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat di bidang pendidikan,

dengan target melek huruf pada usia 15 tahun ke atas dari 94,1% pada tahun 2013 menjadi 96,1% di tahun 2019

7) Akses Layanan Pendidikan Pra Sekolah

Definisi indikator akses layanan pendidikan pra sekolah adalah rumah tangga yang memiliki anak usia pra sekolah yang tidak mendapatkan akses layanan pendidikan pra sekolah. Acuan global indikator ini adalah SDGs *goal* 4 khususnya 4.2. Acuan nasional, yakni RPJMN 2015-2019 buku 1 point 6.5 mengenai Peningkatan Kualitas Kehidupan Manusia Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan, dengan Target Partisipasi PAUD meningkat dari 66,8% di tahun 2014 menjadi 77,2% pada tahun 2019.

8) Sumber Penerangan

Definisi indikator sumber penerangan adalah rumah tangga yang tidak memiliki sumber penerangan yang layak. Acuan global indikator tersebut ialah SDGs *goal* 7 khususnya 7.1

Acuan nasional, yakni RPJMN 2015-2019 buku 1 point 5.4 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat di bidang infrastruktur dasar dan konektivitas. Target rasio elektrifikasi meningkat dari 81,5% (2014) menjadi 96,6% (2019) dan target pembangunan SPBG meningkat dari 40 unit (2014) menjadi 118 unit (2019).

9) Bahan bakar/energi untuk memasak

Definisi indikator bahan bakar/energi untuk memasak adalah rumah tangga yang menggunakan bahan bakar selain listrik dan gas untuk memasak. Acuan global indikator tersebut adalah SDGS *goal* 7 khususnya 7a dan 7b. Acuan nasional, yakni RPJMN 2015-2019 buku 1 point 5.4 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat di bidang kedaulatan energi, dengan target jaringan pipa gas meningkat dari 11.960 km (2014) menjadi 18.322 km (2019).

10) Atap, Lantai dan Dinding

Definisi miskin indikator atap, lantai, dan dinding adalah rumah tangga dengan atap terluas selain dari beton, genteng, sirap, dan asbes. rumah tangga dengan lantai terluas selain marmer, tegel, teraso, kayu, semen, granit. Rumah tangga dengan dinding terluas selain tembok dan kayu. Acuan global, yakni SDGs *goal* 11 khususnya 11.1 Acuan nasional, yakni RPJMN 2015-2019 buku 1 poin 6.6.3 mengenai Membangun Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan target Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk 1,5 juta rumah tangga, termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh. Terasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga dari anggaran Pemerintah.

11) Kepemilikan Rumah

Definisi indikator kepemilikan rumah adalah rumah tangga yang tidak memiliki sendiri rumah yang ditempatinya. Acuan global, yakni SDGs *goal* 11 khususnya 11.1 Acuan nasional, yakni RPJMN 2015-2019 buku 1 point 5.4 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat di bidang infrastruktur dasar dan konektivitas, dengan Target kekurangan tempat tinggal (*backlog*) dari 7,6 juta (2014) menjadi 5 juta (2019).

Adanya keleluasaan dalam pengembangan indikator dalam MPI selagi tidak keluar dari konteks MPI dan MDGs menjadikan implementasi MPI di Indonesia agak sedikit berbeda. Secara dimensi tetap menggunakan tiga dimensi seperti kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup. Tapi ada indikator yang sedikit berubah. Salah satunya adalah dimensi kesehatan. Dalam data Susenas tidak terdapat data mengenai gizi balita. Data yang ada merupakan konsumsi kalori dan protein dalam level rumah tangga. Untuk itu indikator gizi diganti dengan indikator kalori. Maka penelitian ini menggunakan indikator konsumsi kalori rumah tangga sebagai proksi dari indikator gizi.

Penggunaan indikator kalori per kapita juga sesuai dengan SDGs dan RPJMN 2015-2019. Acuan Global indikator ini ialah SDGs *goal* 2 khususnya 2.1 dan 2.2. Acuan nasionalnya adalah

RPJMN 2015-2019 buku 1 point 5.4 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat di bidang infrastruktur dasar dan konektivitas, dengan target menurunkan prevalensi kekurangan gizi anak balita dari 19,6 % di tahun 2015 menjadi 17% pada tahun 2016.

Setelah mengetahui indikator yang digunakan maka pengukuran mengenai kemiskinan multidimensi dapat dilaksanakan. Selanjutnya, tahapan penghitungan kemiskinan multidimensi (MPI) menurut Alkire-Foster (2011) dan Haris (2016) adalah sebagai berikut:

1) Menentukan dimensi

Penentuan dimensi sangat penting dilakukan untuk melihat dimensi apa yang dianggap berpengaruh terhadap pembentukan MPI. Penentuan dimensi harus disertai argumentasi yang logis dan relevan dengan keadaan kemiskinan di masyarakat. Dalam kajian ini, ada tiga dimensi yang digunakan

2) Menentukan indikator

Indikator setiap dimensi dipilih dengan prinsip *accuracy* dan *parsimony*. Ada 11 indikator yang digunakan dalam kajian ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Indikator dipilih mengacu pada target SDGs 2030 dan RPJMN 2015-2019 sehingga konteksnya bisa sesuai dengan kebijakan dan dapat mengevaluasi pencapaian pemerintah.

3) Menentukan bobot masing-masing dimensi dan indikator

Menurut metode AF, setiap dimensi MPI diberikan bobot dengan metode rata-rata, sehingga diperoleh nilai bobot yang sama untuk setiap dimensi. Selanjutnya, metode rata-rata juga digunakan untuk mendapatkan bobot masing-masing indikator pada setiap dimensi, sehingga setiap indikator dalam satu dimensi yang sama memiliki nilai bobot yang sama, namun bisa berbeda dengan indikator pada dimensi yang lain. Bobot masing-masing indikator dan dimensi dalam kajian ini disajikan pada berikut:

Tabel 1. Bobot Dimensi dan Indikator Kemiskinan Multidimensi

Dimensi	Bobot dimensi	Indikator	Bobot indikator
Kesehatan	1/3	Sanitasi	1/12
		Air Bersih	1/12
		Penolong persalinan	1/12
		Kalori	1/12
Pendidikan	1/3	Keberlangsungan pendidikan	1/9
		melek huruf	1/9
		Akses layanan pendidikan pra sekolah	1/9
Standar hidup	1/3	Sumber penerangan	1/12
		Bahan bakar memasak	1/12
		Atap, dinding, lantai rumah	1/12
		Kepemilikan rumah	1/12

4) Membuat *cut off* pertama

Cut off pertama dibuat untuk setiap indikator dan merupakan ambang batas minimum bagi setiap indikator

sebagai penentu apakah suatu rumah tangga terdeprivasi pada indikator tersebut atau tidak. *Cut off* masing-masing indikator sudah diuraikan sebelumnya.

5) Mengaplikasikan *cut off* pertama

Setiap rumah tangga diberikan penilaian terhadap masing-masing indikator. Indikator yang terdeprivasi diberikan skor 1, sebaliknya indikator yang tidak terdeprivasi diberikan skor 0.

6) Menghitung jumlah deprivasi dari setiap rumah tangga

Formula penghitungan jumlah deprivasi (skor kemiskinan multidimensi) setiap rumah tangga:

$$C_i = w_1 I_1 + w_2 I_2 + \dots + w_d I_d$$

Dimana $I_i = 1$ jika seseorang kena dalam indikator i dan $I_i = 0$ jika bukan. w_i adalah bobot dari indikator $\sum_{i=1}^d w_i = 1$

7) Mengaplikasikan *cut off* kedua

Rumah tangga yang memiliki skor $C \geq 1/3$ (miskin multidimensi) diberikan sensor skor (C') sebesar C , sedangkan rumah tangga yang memiliki skor $C < 1/3$ (tidak miskin multidimensi) diberikan sensor skor (C') senilai 0

8) Menghitung jumlah rumah tangga dan penduduk yang miskin multidimensi

Rumah tangga yang miskin multidimensi diberikan kode 1, sedangkan rumah tangga yang tidak miskin multidimensi

diberikan kode 0. Jumlah rumah tangga yang miskin multidimensi dalam suatu wilayah dilakukan dengan menjumlahkan kode seluruh rumah tangga di wilayah tersebut. Sedangkan untuk menghitung jumlah penduduk yang miskin multidimensi, jumlahkan seluruh anggota rumah tangga (ART) dari semua rumah tangga yang berkode 1.

- 9) Menghitung *headcount* ratio (H)

Formula penghitungan H adalah:

$$H = \frac{q}{n}$$

di mana q adalah banyaknya penduduk miskin multidimensi, dan n adalah total penduduk.

- 10) Menghitung intensitas kemiskinan multidimensi (A)

Formula penghitungan A adalah:

$$A = \frac{\sum_{i=1}^d w_i c_i}{q}$$

Di mana $c_i(k)$ adalah skor dari individu i dan q adalah jumlah individu yang mengalami kemiskinan multidimensi

- 11) Menghitung indeks kemiskinan multidimensi (MPI)

MPI adalah perkalian antara *multidimensi headcount ratio* (H) dengan *intensity of poverty* (A). Sehingga untuk mendapatkan angka MPI dipergunakan rumus $MPI = H \times A$

- 12) Mendekomposisikan angka kemiskinan multidimensi

Angka kemiskinan multidimensi dapat didekomposisikan dan dianalisis lebih lanjut menurut status daerah tempat tinggal rumah tangga, dan lain sebagainya sesuai kecukupan data yang tersedia

13) Menginterpretasikan output

Langkah terakhir adalah menginterpretasikan hasil penghitungan kemiskinan multidimensi secara deskriptif disertai gambar (grafik) agar lebih jelas dan mudah dipahami.

5. Program Pemerintah Kota Yogyakarta Terkait Kemiskinan

Pemerintah Kota Yogyakarta tentu tidak tinggal diam dan membiarkan kemiskinan. Mereka mengupayakan warganya agar terbebas dari jerat kemiskinan dengan berbagai program. Program tersebut disinergikan dengan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah pusat.

Menurut Hafidh dkk. (2016), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta terbagi menjadi dua jenis, yaitu program-program inisiatif daerah dan program-program yang diluncurkan Pemerintah Pusat.

Sementara itu, dalam konteks program pemerintah pusat, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan didasarkan pada penggolongan klaster yang terdiri atas 3 klaster yaitu: klaster program penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis rumah tangga, klaster program penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, dan klaster

program penanggulangan kemiskinan berbasis usaha mikro dan kecil.
berikut penjelasan dari masing-masing klaster:

1) Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah
Tangga

Dalam skema program penanggulangan kemiskinan berdasarkan klaster, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis rumah tangga merupakan skema klaster 1, dimana program ini ditujukan kepada golongan masyarakat rentan; seperti Kepala Keluarga yang lanjut usia, perempuan serta keluarga yang sangat miskin ataupun sulit untuk diberdayakan. Dalam skema ini terdapat Program Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas, Beasiswa bagi si Miskin dan BLT bila dalam masa krisis.

2) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas

Salah satu program berbasis komunitas adalah PNPM Mandiri Program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

3) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro
dan Kecil

Program ini terurai dengan skema pemberian modal usaha bagi Industri Kecil Menengah (IKM), UMKM dan Koperasi. Saat ini Dinas Perindustrian & Perdagangan dan

Koperasi Kota Yogyakarta mempunyai beberapa program penanggulangan kemiskinan. Program-program tersebut antara lain : Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan

Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki program-program bantuan untuk masyarakat miskin terutama bagi mereka yang tidak tercover bantuan pemerintah pusat, antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan, selain program-program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat tentunya. Salah satu program di bidang pendidikan adalah dengan memberi kuota 20% bagi pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) untuk dapat masuk sekolah negeri. Sementara pada bidang kesehatan, Pemkot Yogyakarta menggratiskan biaya persalinan melalui program Jaminan Persalinan (Jampersal).

Salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial guna menjamin warganya yang miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak adalah dengan pengelolaan jaminan dan bantuan sosial. Dengan cara memfasilitasi penyaluran bantuan sosial bagi usia lanjut yang terlantar, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Lebih lanjut, Pemerintah Kota Yogyakarta juga memprioritaskan advokasi dan rehabilitasi sosial kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak atau miskin secara kemanusiaan dan memiliki kriteria

masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Untuk meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial, Dinas Sosial didukung oleh beberapa organisasi perangkat daerah lainnya.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tegar Rismanuar Nuryitmawan (2016) yang berjudul “Studi Komparasi Kemiskinan di Indonesia: *Multidimensional Poverty* dan *Monetary Poverty*”. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari *International Family Life Survey* (IFLS) 2007. Metode yang digunakan adalah *Alkire-Foster Method* untuk mengestimasi *multidimensi poverty index* dan regresi logistic. Hasil perhitungan *Alkire-Foster Method* menunjukkan bahwa rumah tangga yang teridentifikasi miskin multidimensi lebih besar daripada rumah tangga yang teridentifikasi miskin moneter. Secara umum dimensi yang menyumbang tertinggi kemiskinan multidimensi adalah dimensi standar hidup. Sedangkan dari hasil estimasi menunjukkan bahwa seluruh dimensi yakni dimensi pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup berpengaruh terhadap identifikasi kemiskinan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengukur kemiskinan multidimensi. Sedangkan perbedaannya terletak pada data yang digunakan dan ruang lingkup penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sabina Alkire dan Yangyan Sen (2015) dengan judul *Exploring Multidimensi Poverty in China*. Data yang digunakan adalah data China Family Panel Studies (CFPS) yang mencakup 42.000 penduduk yang merepresentasikan penduduk di 25 provinsi di China. Hasilnya adalah sebanyak 12,6% penduduk mengalami kemiskinan dari segi pendapatan, sebanyak 5,5% penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi dan hanya 1,6% penduduk yang mengalami kemiskinan keduanya. Dari hasil perhitungan juga didapatkan jika kemiskinan multidimensi di China Bagian Barat jumlahnya lebih tinggi dengan China bagian Tengah dan Timur. Indikator penyumbang kemiskinan multidimensi tertinggi adalah nutrisi dan kehadiran dalam sekolah. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai kemiskinan multidimensi. Adapun perbedaannya adalah tentang ruang lingkup penelitian dan indikator yang digunakan.
3. Penelitian yang dilakukan Sabina Alkire, Christoph Jindra, Gisela Robles dan Ana Vaz dengan judul *Multidimensi Poverty in Africa* (2016). Penelitian ini dilakukan di 46 negara Afrika. Hasil penelitian ini menyebutkan jika 54% penduduk di Afrika mengalami kemiskinan multidimensi. Sebanyak 35 negara mengalami perubahan angka kemiskinan multidimensi, dimana 30 negara berhasil menurunkan angka kemiskinan multidimensi. Deprivasi tertinggi kemiskinan multidimensi di Afrika disumbangkan oleh indikator bahan bakar untuk

memasak, listrik, dan sanitasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai kemiskinan multidimensi. Adapun perbedaannya adalah soal ruang lingkup penelitian dan indikator yang digunakan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi DIY bekerjasama dengan BPS Provinsi DIY Berjudul Analisis Kemiskinan Multidimensi dan Ketahanan Pangan di DIY (2016). Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa indikator kemiskinan berupa proporsi penduduk miskin secara multidimensi dapat menunjukkan insiden atau besarnya persentase penduduk miskin. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin D.I. Yogyakarta adalah sebesar 21,64 persen dan mengalami kenaikan sekitar 0,51 poin menjadi 22,15 pada tahun 2015. Selama tahun 2013-2015 intensitas kemiskinan multidimensi di D.I. Yogyakarta cenderung menunjukkan perubahan kurang bagus. Intensitas kemiskinan multidimensi mengalami peningkatan sebesar 3,23 poin dari 41,37 persen pada tahun 2013 menjadi 44,60 persen di tahun 2015. Tingkat kemiskinan multidimensi DIY yang sudah disesuaikan dengan intensitas kemiskinan multidimensi (A) adalah sebesar 9,01 persen. Sementara itu pada tahun 2015 angka tersebut sedikit meningkat menjadi 9,89 persen. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai kemiskinan multidimensi. Adapun perbedaannya adalah soal ruang lingkup penelitian dan indikator yang digunakan.

C. Kerangka Berpikir

Terdapat berbagai macam definisi maupun standar yang digunakan oleh para ahli dalam mengukur kemiskinan. Para ahli mendefinisikan kemiskinan sebagai persoalan kekurangan dalam ekonomi sampai pada hal yang lebih luas yaitu ketidakmampuan untuk melakukan akses terhadap layanan sosial.

Selama ini pendekatan ekonomi dalam mengukur kemiskinan lebih banyak digunakan oleh instansi terkait dalam konteks pemerintahan Indonesia. Pendekatan tersebut dikritik oleh para ahli karena pendekatan ekonomi hanya memotret sebagian kecil dari persoalan kemiskinan.

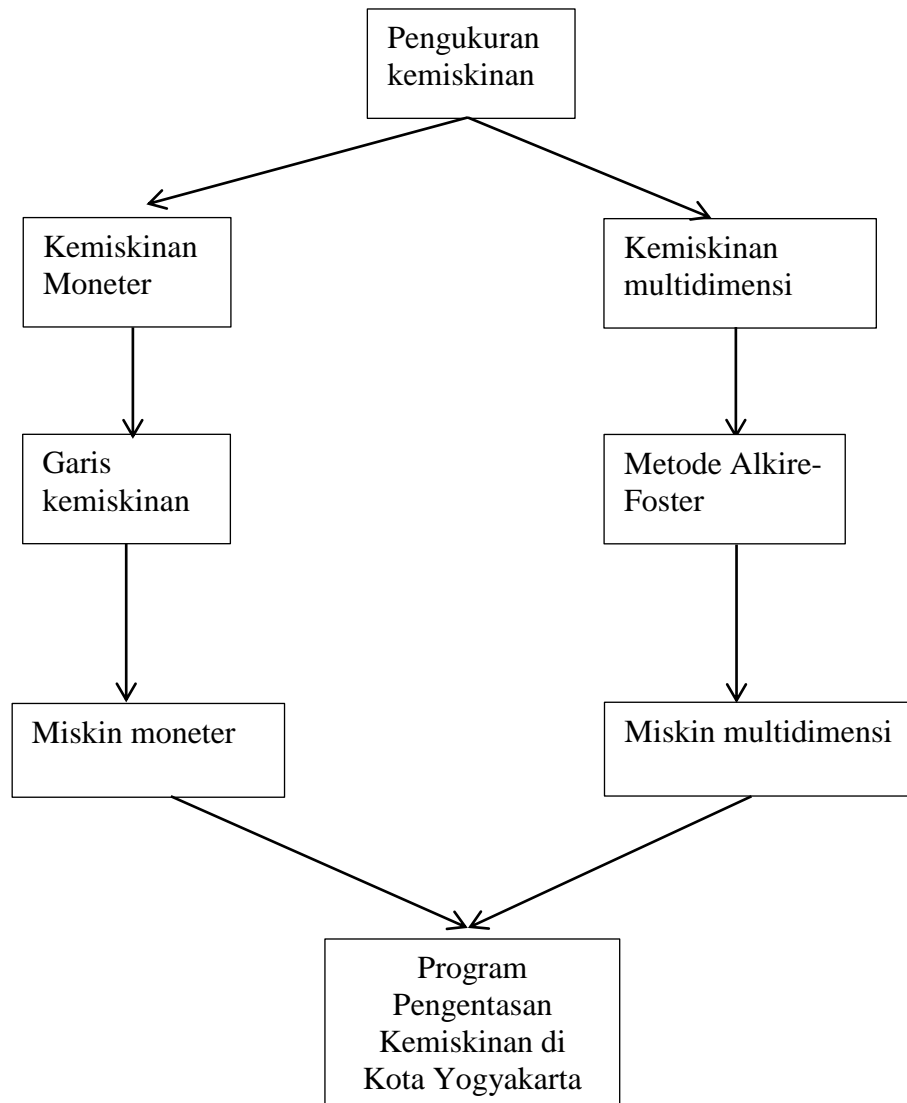
Pada tahun 2010, *United National Development Program (UNDP)* dan *Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI)* memperkenalkan konsep *Multidimensi Poverty Index (MPI)* untuk melakukan pengukuran kemiskinan. MPI memuat 3 indikator utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Dimensi yang tercakup dalam MPI sifatnya fleksibel menyesuaikan kondisi yang dialami oleh suatu negara. Di negara Indonesia, pengukuran MPI menggunakan 11 indikator yang dikembangkan oleh Perkumpulan Prakarsa.

Permasalahan kemiskinan di Kota Yogyakarta tidak terkait pada persoalan ekonomi semata. Adanya masalah dalam hal penyediaan air bersih, sanitasi, dan kekumuhan wilayah menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang sifatnya multidimensi.

Keberadaan Kota Yogyakarta dengan segala permasalahannya membuat persoalan kemiskinan menjadi lebih kompleks. Perhitungan kemiskinan dengan menggunakan *Multidimensional Poverty Index* (MPI) dinilai cocok diterapkan di Kota Yogyakarta karena metode perhitungan ini lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas mengenai kemiskinan multidimensi maka penulis akan melakukan penelitian mengenai kemiskinan multidimensi di Kota Yogyakarta.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, maka pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kemiskinan moneter di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana kondisi kemiskinan multidimensi di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana perbandingan kemiskinan moneter dan multidimensi di Kota Yogyakarta?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Nazir (1988: 63) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder didapatkan dari hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016 dengan ruang lingkup kota Yogyakarta.

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian ini adalah:

1. Kemiskinan multidimensi

Kemiskinan multidimensi dihitung dengan menggunakan konsep Alkire Foster dimana seseorang dinyatakan miskin atau tidak berdasarkan penjumlahan dari setiap indikator kemiskinan. Apabila total rata-rata penilaian lebih besar dari 0,333 maka individu dikategorikan

miskin. Sementara dimensi dan indikator kemiskinan dapat disimak pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Dimensi dan Indikator Kemiskinan Multidimensi

Dimensi	Indikator	Deskripsi
Kesehatan	Sanitasi	Rumah tangga yang tidak memiliki sanitasi sendiri dan menggunakan sanitasi selain leher angsa
	Air Bersih	Rumah tangga yang tidak memiliki sumber air bersih bukan dari sumur terlindung, ledeng meteran, ledeng eceran, mata air terlindung dan jarak sumber air dengan septic tank lebih dari 10 m.
	Penolong persalinan	Rumah tangga yang saat proses persalinannya ditolong bukan dokter/bidan/paramedis lainnya
	Kalori	Rumah tangga yang tidak mampu memenuhi 70% kebutuhan kalori tiap harinya
Pendidikan	Keberlangsungan pendidikan	Rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah yang tidak menyelesaikan pendidikannya hingga sekolah lanjutan atas
	melek huruf	Rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga usia produktif yang tidak mampu membaca huruf latin
	Akses layanan pendidikan pra sekolah	Rumah tangga yang memiliki anak usia pra sekolah yang tidak mendapatkan layanan pendidikan pra sekolah seperti TK/KB/PAUD dan lainnya
Standar hidup	Sumber penerangan	Rumah tangga yang tidak memiliki sumber penerangan berupa listrik PLN
	Bahan bakar memasak	Rumah tangga yang menggunakan bahan bakar selain listrik dan gas untuk memasak
	Atap, dinding, lantai rumah	Rumah tangga dengan atap terluas selain dari beton, genteng, sirap, dan asbes. rumah tangga dengan lantai terluas selain marmer, tegel, teraso, kayu, semen, granit. Rumah tangga dengan dinding terluas selain tembok dan kayu.
	Kepemilikan rumah	Rumah tangga yang tidak memiliki sendiri rumah rumah yang ditempatinya

2. Kemiskinan Moneter

Penduduk miskin moneter adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah standar yang ditetapkan. Standar yang ditetapkan di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 adalah Rp401.193,00.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian semisal catatan, transkrip, publikasi tertulis, dan lain-lain. Dokumen yang diperlukan adalah hasil Susenas Maret 2016 dan dokumen lain seperti data kemiskinan dari BPS, hasil penelitian Bappeda Provinsi DIY mengenai kemiskinan multidimensi dan laporan Perkumpulan Prakarsa.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara pentahapan secara berurutan dengan pendekatan deskriptif, dengan menggunakan tabel, grafik, dan diagram batang untuk mendeskripsikan data yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Kota Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,5km² atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,5km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,6km. Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar antara 0- 2% dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya pada ketinggian antara 100–199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol.

Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman

Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

Sebelah Barat : Kabupaten Bantul

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemiskinan multidimensi di Kota Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data Survey Ekonomi dan Sosial Nasional (Susenas) Maret 2016.

Pembahasan secara deskriptif akan menampilkan tingkat kemiskinan moneter dan multidimensi di Kota Yogyakarta. Pengukuran kemiskinan moneter menggunakan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Sedangkan pengukuran kemiskinan multidimensi menggunakan metode *Alkire-Foster* di mana MPI dihitung menggunakan bobot tertimbang dari dimensi dan indikator.

Dimensi tersebut adalah dimensi pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Dimensi kesehatan diukur dengan sanitasi, air bersih, penolong persalinan, dan imunisasi. Sedangkan dimensi pendidikan dilihat dari kehadiran dalam pendidikan, melek huruf, dan akses layanan pendidikan pra sekolah. Adapun dimensi terakhir dimensi kualitas hidup diukur dengan sumber penerangan, bahan bakar untuk memasak, dan kondisi atap, dinding, dan lantai rumah dan kepemilikan rumah.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 1788 orang yang terdapat dalam 641 KK. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

B. Hasil Penelitian

1. Kondisi Kemiskinan Moneter di Kota Yogyakarta

Metode yang digunakan oleh BPS untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah pendekatan moneter dengan menggunakan garis kemiskinan. Dalam hal ini garis kemiskinan dilihat dari pengeluaran yang dihabiskan rumah tangga per kapita per bulan. Pada tahun 2016, angka garis kemiskinan sejumlah Rp 401.193,00.

Dari hasil perhitungan didapati bahwa sebesar 137 responden di Kota Yogyakarta (7,66%) mengalami kemiskinan moneter pada tahun 2016. Pengeluaran per kapita mereka berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Sementara 1651 responden (92,34) termasuk dalam golongan tidak miskin.

Tabel 3. Pengeluaran menurut garis kemiskinan di Kota Yogyakarta

Pengeluaran/kapita/jiwa	Jumlah	Persentase
Penduduk di bawah garis kemiskinan	137	7.66%
Penduduk di atas garis kemiskinan	1651	92.34%
Total	1788	100.00%

Sumber data: BPS, 2016 data diolah.

Terjadinya kemiskinan membuat pengeluaran menjadi berbeda-beda. Perbedaan tersebut akan membuat terjadinya perbedaan proporsi pengeluaran berdasarkan makanan dan non makanan. Dari pola pengeluaran rumah tangga, dapat dilihat pola konsumsi rumah tangga di kota Yogyakarta.

Apabila pendapatan lebih tinggi, maka proporsi pengeluaran untuk makanan menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan pengeluaran untuk non makanan. Pada tahun 2016, persentase non makanan terhadap total pengeluaran adalah 57,40%. Semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk non makanan akan menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Tabel 4. Persentase pengeluaran berdasarkan makanan dan non makanan menurut garis kemiskinan di Kota Yogyakarta

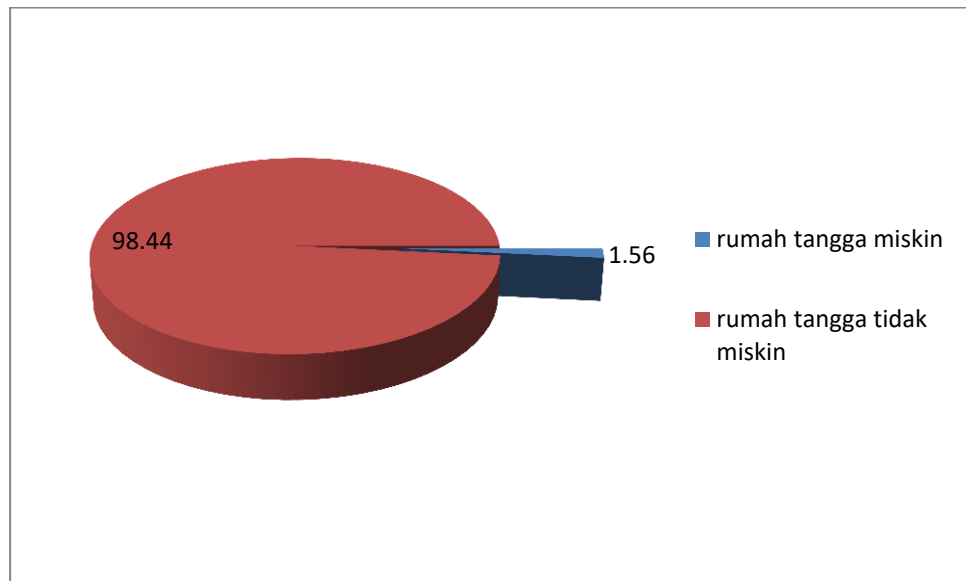
Pengeluaran/kapita/jiwa	Makanan	Non makanan
di bawah garis kemiskinan	56,31%	43,69%
di atas garis kemiskinan	41,58%	58,42%
Total	42,70%	57,30%

Sumber data: BPS, 2016 data diolah.

Perbedaan mengenai pengeluaran tentu akan membuat pola konsumsi menjadi berbeda pula. Penduduk dengan pengeluaran yang lebih rendah cenderung untuk membelanjakan uangnya untuk bahan makanan. Tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan menggunakan pola konsumsi. Semakin sejahtera masyarakat akan membuat proporsi pengeluaran untuk bahan makanan semakin kecil.

2. Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta

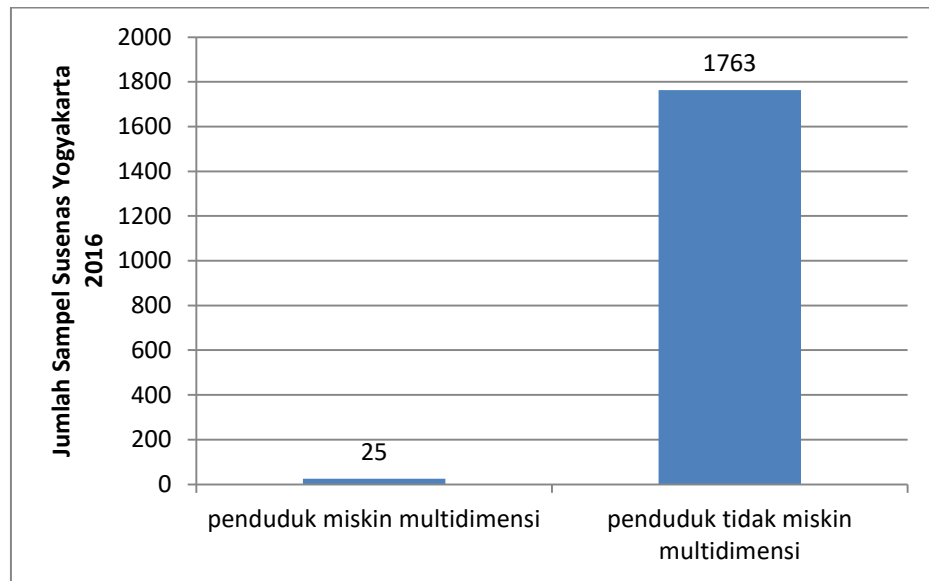
Bila rumah tangga miskin di Kota Yogyakarta berjumlah 7,64% pada tahun 2016, maka rumah tangga miskin multidimensioal jumlahnya lebih sedikit. Hasil perhitungan kemiskinan multidimensi menunjukkan data sebagai berikut.



Gambar 3. Jumlah Rumah Tangga Miskin Multidimensi di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Dari data pada tabel 5 terlihat bahwa sebanyak 10 rumah tangga (1,56%) responden mengalami kemiskinan multidimensi. Sementara sejumlah 631 Rumah Tangga (98,44%) tidak mengalami kemiskinan multidimensi.

Sementara sampel yang mengalami kemiskinan multidimensi mencapai 25 orang atau 1,39%. Adapun yang tidak mengalami kemiskinan multidimensi berjumlah 1763 sampel atau 98,61%.



Gambar 4. Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Setelah mengetahui jumlah rumah tangga miskin maka dapat dicari jumlah penduduk miskin multidimensi. Penduduk miskin multidimensi didapatkan dengan mengalikan jumlah anggota rumah tangga miskin multidimensi. Berikut ini adalah perhitungan kemiskinan multidimensi di Kota Yogyakarta pada tahun 2016:

Tabel 5. Perhitungan Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Angka Kemiskinan Multidimensi (%)	1,39
Keparahan Kemiskinan Multidimensi (%)	34,88
Indeks Kemiskinan Multidimensi	0,00487

Sumber data: BPS, 2016 data diolah.

Berdasarkan perhitungan menurut Alkire-Foster, maka angka kemiskinan multidimensi pada tahun 2016 berjumlah 1,39%. Sedangkan keparahan kemiskinan multidimensi mencapai 34,88%. Indeks kemiskinan multidimensi di tahun 2016 berada di angka 0,00487.

Perhitungan tiap indikator akan menghasilkan angka kemiskinan yang berbeda. Adapun angka kemiskinan tiap indikator didapati sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah Rumah Tangga Miskin tiap Indikator

Indikator	Frekuensi		Persentase	
	miskin	tidak miskin	Miskin	tidak miskin
Kepemilikan rumah	357	284	55.69%	44.31%
Air Bersih	281	360	43.84%	56.16%
Kalori	86	555	13.41%	86.59%
Sanitasi	27	614	4.21%	95.79%
Bahan bakar memasak	27	614	4.21%	95.79%
Akses layanan pendidikan pra sekolah	25	616	3.90%	96.10%
melek huruf	5	636	0.78%	99.22%
Penolong persalinan	1	640	0.16%	99.84%
Keberlangsungan pendidikan	1	640	0.16%	99.84%
Sumber penerangan	1	640	0.16%	99.84%
Atap, dinding, lantai rumah	0	641	0.00%	100.00%

Sumber data: BPS, 2016 data diolah.

Dari tabel di atas dapat diketahui kemiskinan paling tinggi terjadi pada indikator kepemilikan rumah. Lebih dari separuh rumah tangga yang menjadi responden tidak memiliki tempat tinggal sendiri. Sementara kemiskinan terendah terjadi pada indikator atap, dinding, dan lantai rumah dimana tidak ada satupun responden yang mengalami kemiskinan pada indikator tersebut. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tiap indikator sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah Penduduk Miskin tiap Indikator

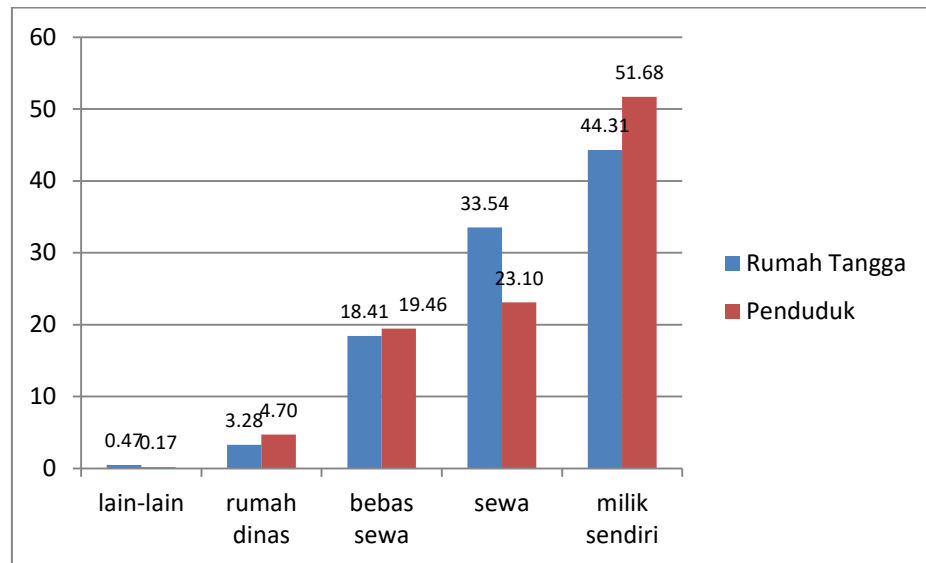
Indikator	Frekuensi		Persentase	
	Miskin	tidak miskin	miskin	tidak miskin
Kepemilikan rumah	864	924	48,32%	51,68%
Air Bersih	800	988	44,74%	55,26%
Kalori	227	1.561	12,70%	87,30%
pendidikan pra sekolah	105	1.683	5,87%	94,13%
Sanitasi	84	1.704	4,70%	95,30%
Bahan bakar memasak	63	1.715	3,52%	96,48%
melek huruf	14	1.774	0,78%	99,22%
Keberlangsungan pendidikan	4	1.784	0,22%	99,78%
Penolong persalinan	3	1.785	0,17%	99,83%
Sumber penerangan	1	1.787	0,06%	99,94%
Atap, dinding, lantai	0	1.788	0,00%	100,00%

Sumber data: BPS, 2016 data diolah.

Dari tabel di atas dapat diketahui kemiskinan paling tinggi terjadi pada indikator kepemilikan rumah. Hampir separuh responden tidak memiliki tempat tinggal sendiri. Sementara kemiskinan terendah terjadi pada indikator atap, dinding, dan lantai rumah dimana tidak ada satupun responden yang mengalami kemiskinan pada indikator tersebut. Hasil statistik deskriptif pada tiap indikator menunjukkan data sebagai berikut:

a. Kepemilikan rumah

Pada indikator kepemilikan rumah, hampir separuh penduduk tidak memiliki rumah sendiri. Berikut ini merupakan jenis kepemilikan rumah di Kota Yogyakarta

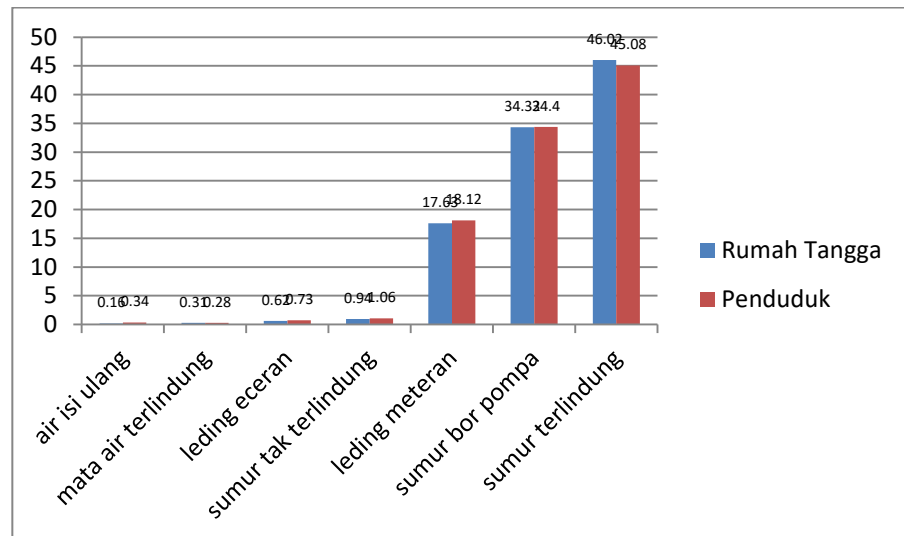


Gambar 5. Jenis Kepemilikan Rumah di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Gambar di atas menunjukkan bahwa hampir setengah penduduk Kota Yogyakarta tidak memiliki rumah sendiri. Mereka paling banyak menempati rumah dengan status sewa. Selain itu ada beberapa bagian penduduk yang menghuni rumah dengan status bebas sewa, rumah dinas, dan lain-lain.

b. Air bersih

Kemiskinan pada indikator air bersih menempati urutan kedua di Yogyakarta. Sebanyak 44,70% penduduk tidak memiliki sumber air bersih sendiri yang berjarak dengan septic tank lebih dari 10m.

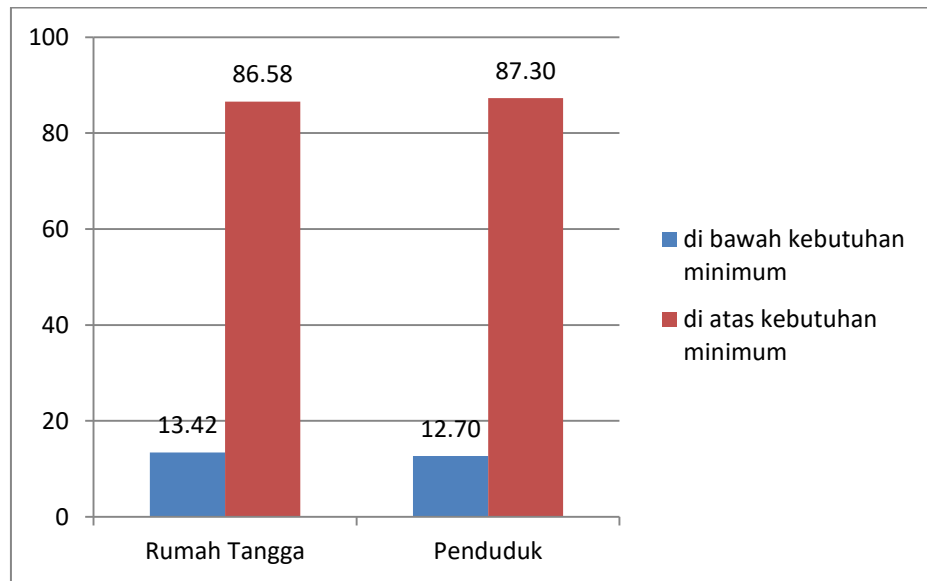


Gambar 6. Sumber Air Bersih yang Digunakan di Kota Yogyakarta 2016

Pada indikator air bersih, kebanyakan penduduk menggunakan air bersih yang berasal dari sumur terlindung dan sumur pompa. Sementara sisanya memakai air yang berasal dari leding meteran, sumur tak terlindung, leding eceran, dan air isi ulang.

c. Kalori

Penduduk yang miskin pada kategori ini adalah mereka yang tidak mampu mencukupi 70% kebutuhan kalorinya setiap hari. Kebutuhan kalori dibedakan menurut usia dan jenis kelamin.

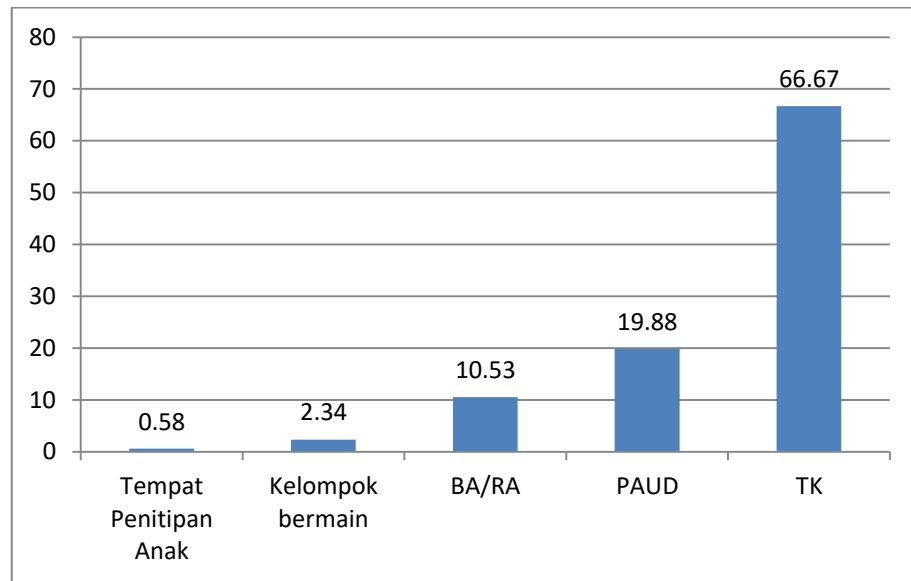


Gambar 7. Persentase Konsumsi Kalori Rumah Tangga dan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Pada indikator ini, sebanyak 12,7% penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan kalorinya per hari.

d. Layanan pendidikan pra sekolah

Penduduk yang miskin pada indikator ini adalah mereka yang memiliki anak usia 3-6 tahun yang tidak mendapatkan akses pada pendidikan pra sekolah. Sebanyak 5,87% penduduk belum mendapat akses pendidikan pra sekolah di kota Yogyakarta. Sementara anak yang mendapat pendidikan pra sekolah, mendapatkan pendidikan pra sekolah pada berbagai lembaga pendidikan sebagai berikut:

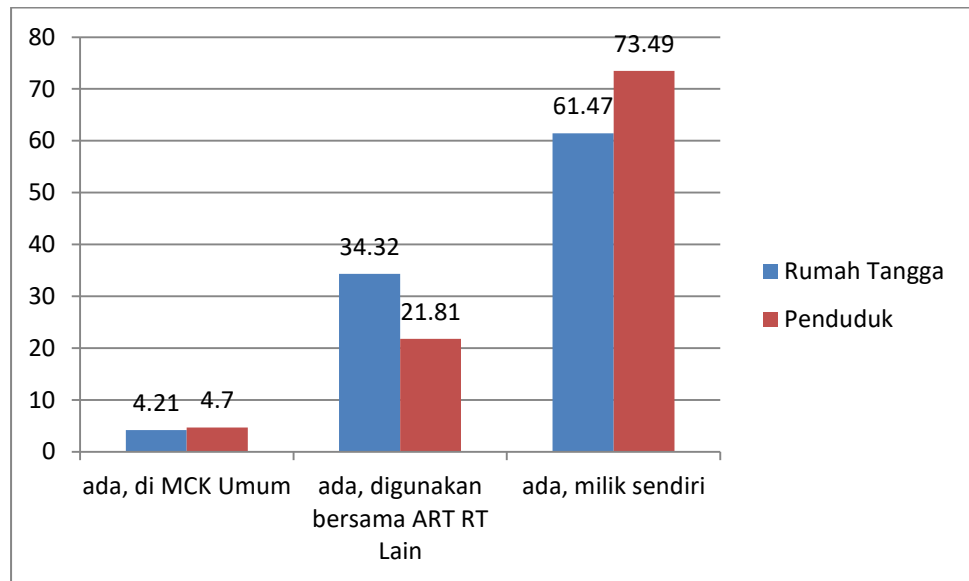


Gambar 8. Jenis Pendidikan Pra Sekolah yang Ditempuh di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Dari gambar di atas terlihat bahwa mayoritas anak usia pra sekolah menikmati layanan pendidikan di Taman Kanak-Kanak. Sisanya berada di PAUD, BA/RA, kelompok bermain, dan TPA.

e. Sanitasi

Kepemilikan sanitasi sendiri menjadi syarat agar penduduk tidak dikategorikan miskin pada indikator ini. dari hasil perhitungan, terdapat 4,7% penduduk yang menggunakan sanitasi secara komunal atau memakai MCK umum.

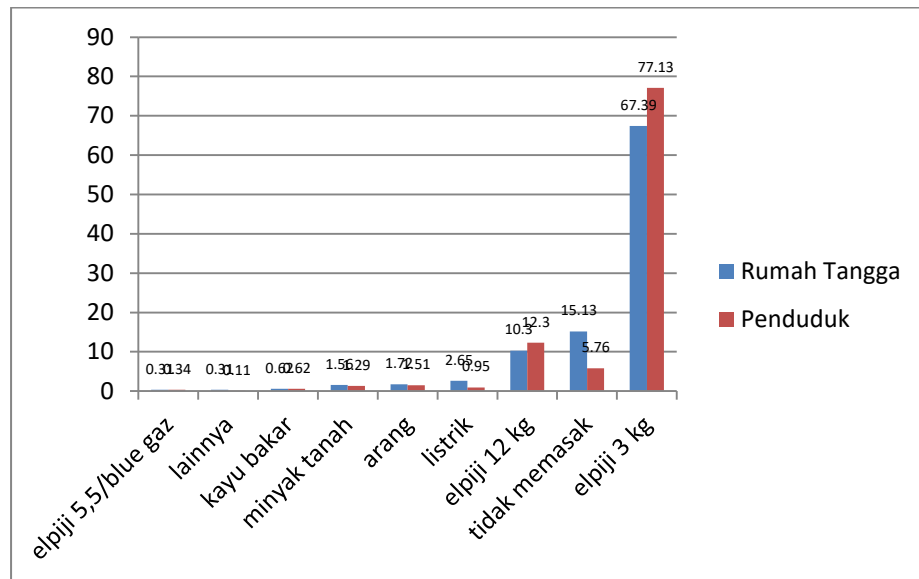


Gambar 9. Jenis Penggunaan Sanitasi di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Sebagian penduduk Kota Yogyakarta sudah memiliki sanitasi sendiri. Sisanya menggunakan sanitasi berbagi bersama tetangga dan menggunakan sanitasi komunal.

f. Bahan bakar memasak

Terdapat 3,52% penduduk yang mengalami kemiskinan pada indikator ini. mereka menggunakan bahan bakar selain listrik dan gas untuk memasak. Perbedaan mengenai bahan bakar yang digunakan untuk memasak dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

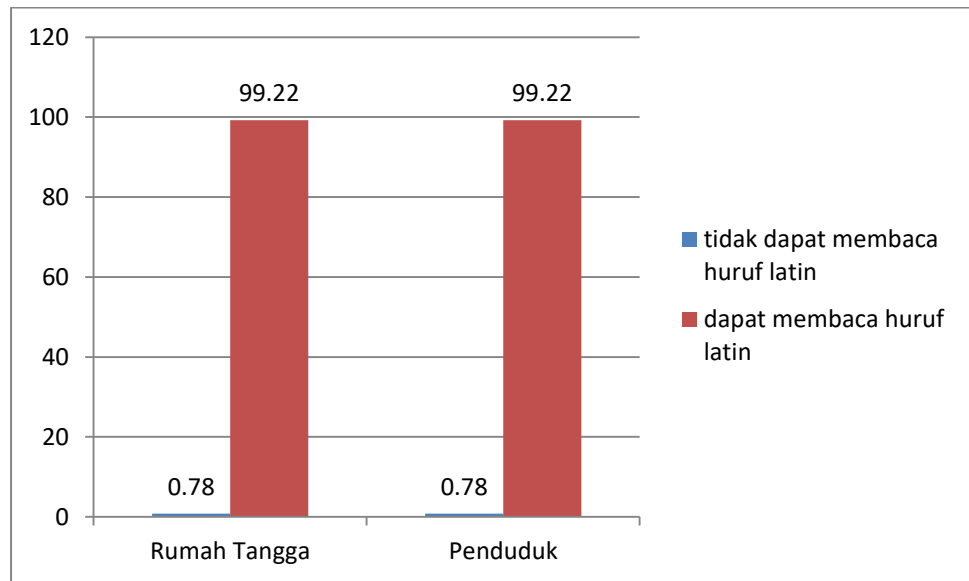


Gambar 10. Jenis Bahan Bakar Memasak di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Dari gambar di atas terlihat bahwa masih terdapat sebagian kecil penduduk yang menggunakan bahan bakar non gas untuk memasak. Mereka memasak menggunakan, arang, minyak tanah, kayu bakar, dan lainnya.

g. Melek huruf

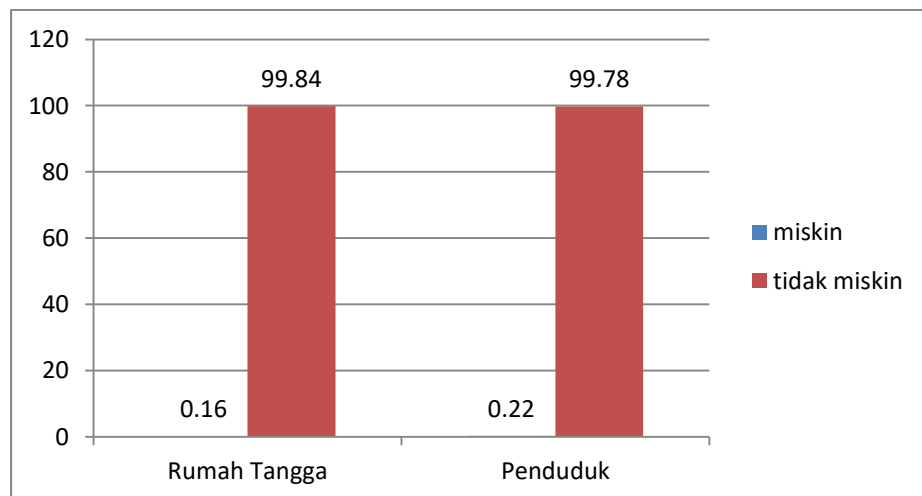
Terdapat 0,78% penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis huruf latin di Kota Yogyakarta pada tahun 2016. Berikut adalah perbandingan mengenai penduduk miskin dan tidak miskin pada indikator melek huruf



Gambar 11. Proporsi Penduduk dan Rumah Tangga Melek Huruf di Kota Yogyakarta 2016

h. Keberlangsungan pendidikan

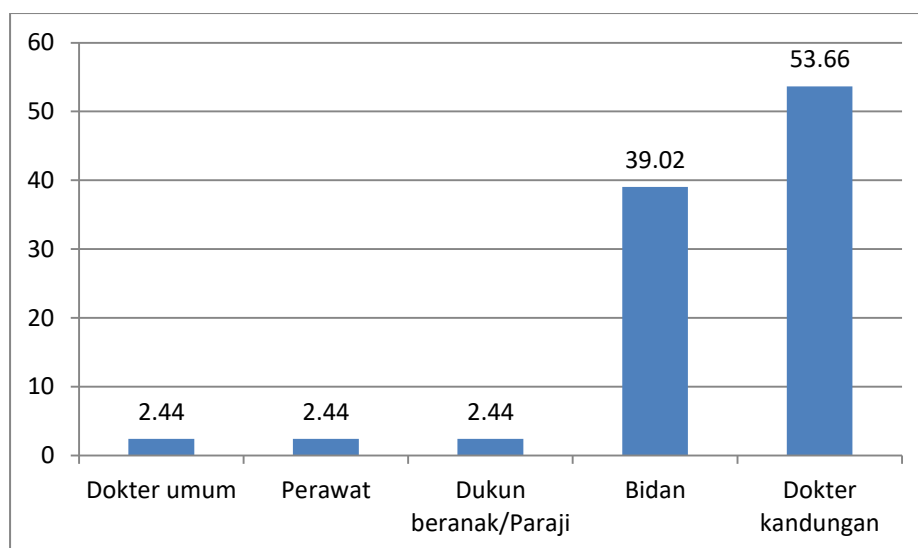
Pada tahun 2016, ada 0,17% penduduk yang miskin pada indikator ini. Mereka memiliki anak usia sekolah namun terpaksa putus sekolah. Mereka masih berusia sekolah namun tidak mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA).



Gambar 12. Proporsi Penduduk dan Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Yogyakarta 2016

i. Penolong persalinan

Terdapat 0,17% penduduk yang proses persalinannya bukan ditolong oleh tenaga medis dan persalinannya ditolong oleh dukun beranak/paraji. Mereka dianggap miskin pada indikator ini. Secara lengkap, berikut ini merupakan tenaga medis yang menolong persalinan penduduk pada tahun 2016



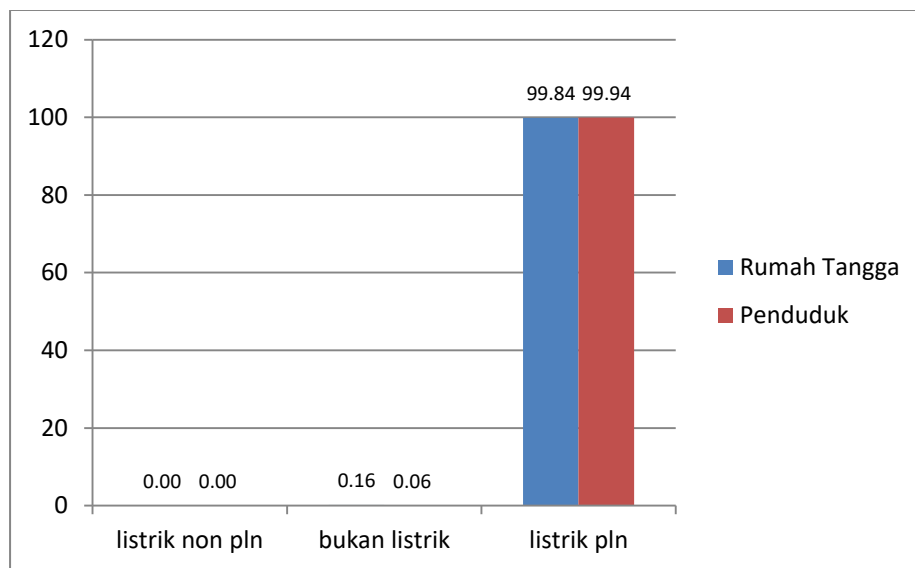
Gambar 13. Jenis Penolong Persalinan di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Dari gambar di atas terlihat bahwa mayoritas penduduk Kota Yogyakarta memanfaatkan tenaga medis dalam menolong persalinan mereka. Hanya sebagian kecil yang persalinannya dibantu oleh dukun beranak.

j. Sumber penerangan

Penduduk yang dikategorikan miskin pada kategori ini merupakan penduduk yang menggunakan sumber penerangan

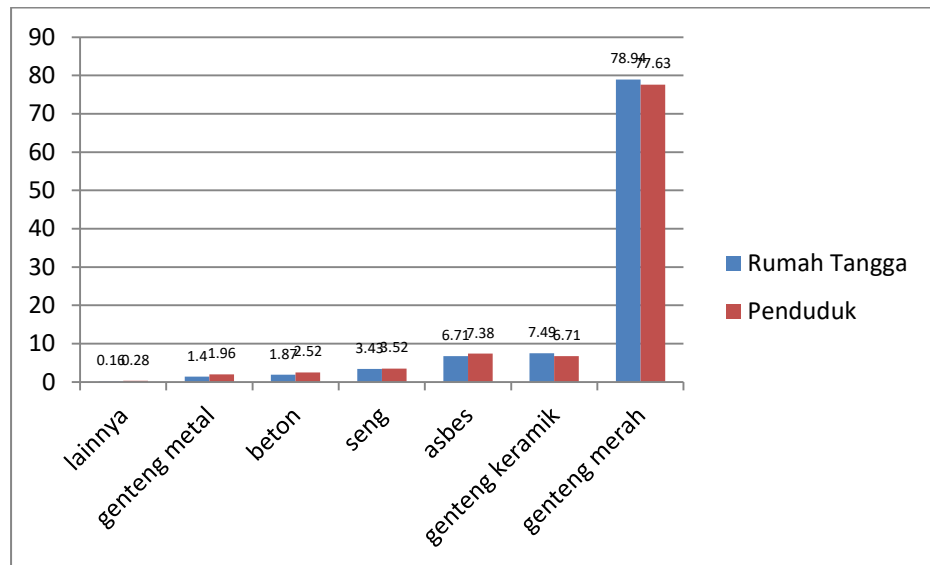
bukan dari listrik PLN. Terdapat 0,06% penduduk yang mengalami kemiskinan pada indikator ini. Pada tahun 2016, sumber penerangan penduduk di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 14. Jenis Sumber Penerangan di Kota Yogyakarta Tahun 2016

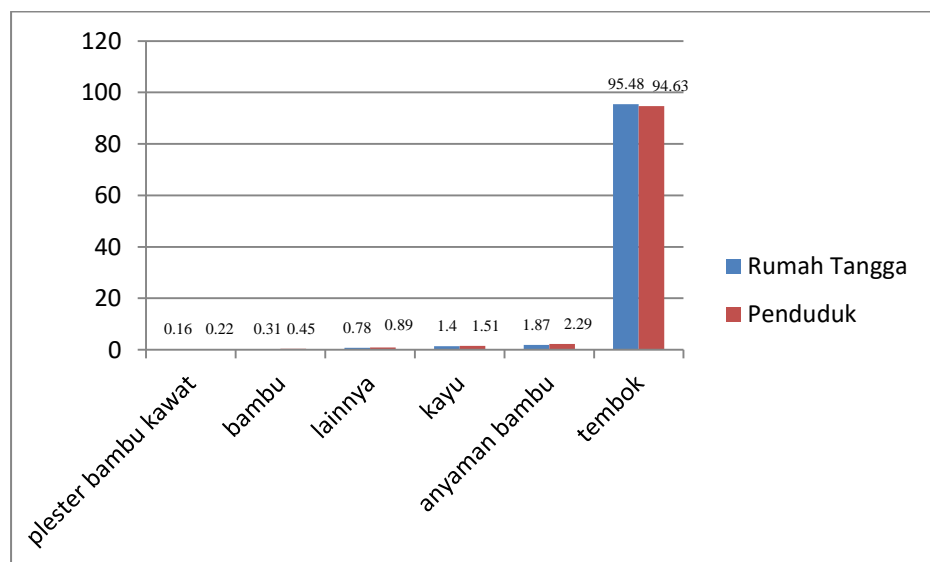
k. Atap, dinding, lantai rumah

Tidak ada penduduk miskin pada indikator tersebut. Pada atap rumah yang digunakan, sebagian besar penduduk sudah menggunakan genteng. Gambar di bawah ini menunjukkan atap yang digunakan oleh penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2016.



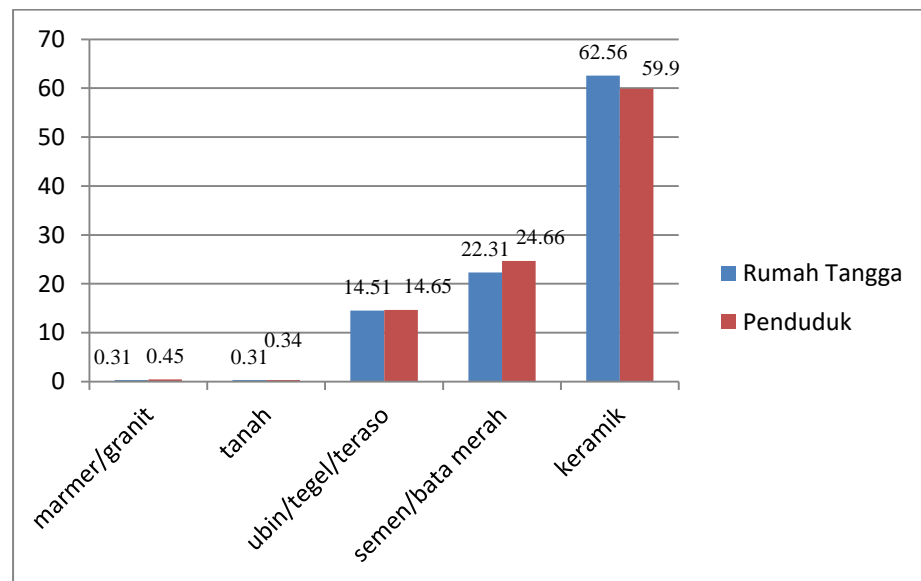
Gambar 15. Jenis Atap Rumah di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Sementara untuk dinding, mayoritas rumah di Kota Yogyakarta berdinding tembok dan kayu. Hanya sebagian kecil saja yang masih menggunakan dinding berupa anyaman bambu, bambu, dan lainnya. Berikut ini merupakan dinding yang digunakan oleh rumah di Kota Yogyakarta pada tahun 2016



Gambar 16. Jenis Dinding Rumah di Kota Yogyakarta Tahun 2016

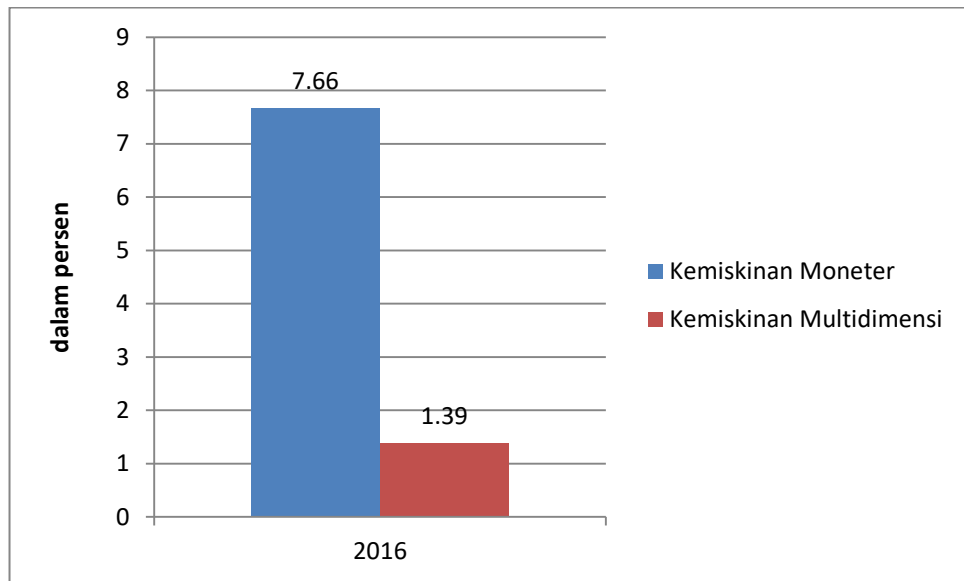
Pada lantai rumah, penduduk di kota Yogyakarta sebagian besar memiliki rumah berlantai keramik. Namun masih ada bagian kecil dari penduduk yang memiliki rumah berlantai tanah. Jenis lantai yang digunakan oleh penduduk dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 17. Jenis Lantai Rumah di Kota Yogyakarta Tahun 2016

3. Perbandingan Kemiskinan Moneter dan Multidimensi di Kota Yogyakarta

Angka kemiskinan multidimensi tahun 2016 lebih rendah bila dibandingkan dengan kemiskinan moneter. Pada tahun tersebut, jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang mengalami kemiskinan multidimensi adalah 1,39%. Sedangkan jumlah penduduk miskin moneter mencapai 7,66%.



Gambar 18. Perbandingan Antara Tingkat Kemiskinan Moneter dengan Multidimensi di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Kemiskinan moneter hanya melihat satu indikator saja yaitu pengeluaran per kapita per bulan. Sementara kemiskinan multidimensi diukur menggunakan lebih dari satu indikator dan tentunya lebih kompleks penghitungannya.

C. Pembahasan

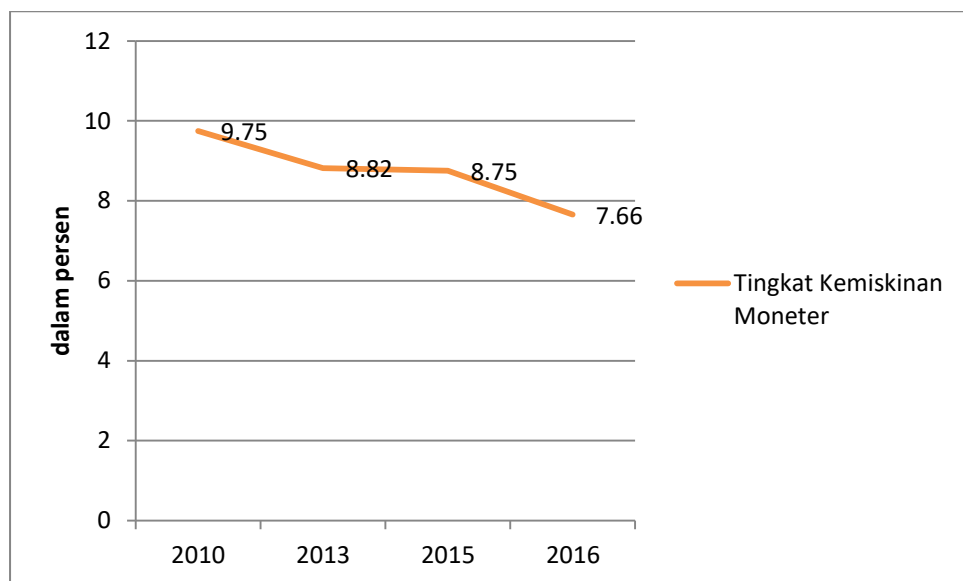
1. Kondisi Kemiskinan Moneter di Kota Yogyakarta

BPS menggunakan garis kemiskinan untuk mengukur kemiskinan moneter. Garis kemiskinan didapat dari total pengeluaran/kapita/bulan baik pengeluaran makanan maupun non makanan. Pada tahun 2016, angka garis kemiskinan sejumlah Rp 401.193,00.

Angka garis kemiskinan tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2015, garis kemiskinan ditetapkan di angka Rp 383.966,00. Sedangkan pada tahun 2010 yang digunakan sebagai tahun dasar, garis kemiskinan berada di angka Rp 290.286,00. Dengan demikian dalam

kurun waktu 2010 sampai 2016 telah terjadi peningkatan garis kemiskinan sejumlah 38,2%.

Kemiskinan moneter di Kota Yogyakarta diketahui menurun jumlahnya menjadi 7,66% pada tahun 2016. Angka tersebut terus menurun dari tahun sebelumnya dan tahun 2013 yakni 8,75% dan 8,82%. Adapun angka kemiskinan pada tahun 2010 berada di angka 9,75%.



Gambar 19. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Moneter Kota Yogyakarta Tahun 2010, 2013, 2015, dan 2016.

Selanjutnya dari data juga dapat dilihat mengenai pola konsumsi penduduk Kota Yogyakarta. Perbedaan terjadi pada penduduk Kota Yogyakarta yang hidup dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan dengan yang hidup di atas garis kemiskinan.

Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menghabiskan sebagian besar pengeluaran untuk membeli makanan. Jumlahnya mencapai 56,31% sementara pengeluaran untuk non makanan sebanyak 43,69%.

Berbanding terbalik dengan penduduk yang hidup di atas garis kemiskinan. Proporsi pengeluaran mereka untuk membeli bahan makanan lebih kecil dibanding pengeluaran non makanan. Sebanyak 41,58% dikeluarkan penduduk yang hidup di atas garis kemiskinan untuk membeli bahan makanan, sementara pengeluaran non makanan mereka berada di angka 58,42%.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa semakin besar pengeluaran, maka proporsi untuk pembelian bahan makanan menjadi semakin kecil. Hal ini sesuai dengan hukum Engel yang berbunyi “jika pendapatan meningkat, maka persentasi pengeluaran untuk konsumsi pangan semakin kecil”.

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengurangi angka kemiskinan moneter harus terus dilakukan. Pemerintah dapat memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok atau subsidi pembelian lauk pauk agar harga bahan makanan menjadi terjangkau bagi penduduk miskin. Selain itu pemerintah harus terus menjaga daya beli penduduk miskin dengan mengendalikan tingkat inflasi.

2. Kondisi Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta

Pada tahun 2016, jumlah rumah tangga yang mengalami miskin multidimensi sebanyak 1,56%. Sementara penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi sejumlah 1,39%. Angka ini lebih rendah bila melihat tingkat kemiskinan moneter. Di tahun yang sama, terdapat 7,64% rumah tangga yang mengalami kemiskinan moneter di Kota Yogyakarta.

Sementara penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi mencapai 7,66%.

Penduduk miskin multidimensi di kota Yogyakarta tahun 2016 berada di angka 1,39%. Bila dibandingkan dengan data terdahulu, terlihat bahwa angka kemiskinan multidimensi di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2010-2016. Hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan fluktuasi yang terjadi.

Tabel 7. Fluktuasi Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta Tahun 2010, 2013, 2015, dan 2016

	2010	2013	2015	2016
Angka Kemiskinan Multidimensi (%)	6,91	2,81	12,55	1,39
Keparahan (%)	36,91	36,76	39,07	34,88
Indeks Kemiskinan Multidimensi	0,025	1,03	4,97	0,00487

Sumber data: BPS, 2016, data diolah. Perkumpulan Prakarsa, 2012. Bappeda Provinsi DIY. 2016.

Pada tahun 2010, angka kemiskinan multidimensi mencapai 6,91%. Jumlah tersebut turun menjadi 2,81% pada tahun 2013. Dua tahun berikutnya, jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi melonjak hampir 6 kali lipat menjadi 12,55%. Angka tersebut kembali turun pada tahun berikutnya menjadi 1,39%.

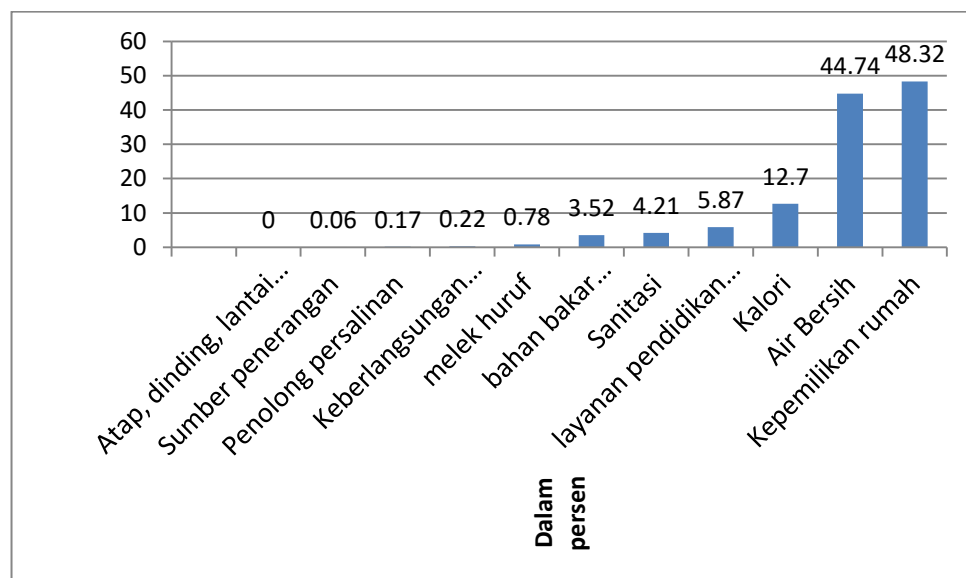
Sedangkan keparahan kemiskinan multidimensi di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 mencapai 34,88%. Tingkat keparahan kemiskinan turun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka keparahan tertinggi berada pada tahun 2015 mencapai 39,07%.

Indeks kemiskinan multidimensi di tahun 2016 mengalami dibanding tahun 2010. Jika pada tahun 2010 indeks kemiskinan

multidimensi mencapai 0,025. Angka tersebut menjadi 0,00487 pada tahun 2016. Secara keseluruhan, nampak bahwa indeks kemiskinan multidimensi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 dan 2015, sempat terjadi kenaikan indeks kemiskinan multidimensi, akan tetapi jumlah tersebut turun pada tahun berikutnya.

Terjadinya fluktuasi di atas dikarenakan berubahnya indikator dan bobot penilaian untuk tiap indikator. Perubahan indikator terjadi untuk menyesuaikan program yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Indikator terbaru banyak didasarkan pada RPJMN 2015-2019 dan agenda SDGS 2030.

Pada tiap indikator, kemiskinan yang dijumpai cukup beragam. Angka tertinggi terjadi pada indikator kepemilikan rumah. Sementara angka terendah terjadi pada indikator atap, dinding, dan lantai rumah.



Gambar 20. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Indikator di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Dari data di atas dapat terlihat bahwa angka kemiskinan multidimensi pada indikator kepemilikan rumah menjadi yang tertinggi dengan 48,32% penduduk mengalami kemiskinan pada indikator tersebut. Kemiskinan kedua terbanyak ditempati indikator air bersih dan terdapat 44,74% penduduk mengalami kemiskinan pada indikator ini. Sementara angka kemiskinan paling rendah terdapat pada indikator atap, dinding, dan lantai rumah dengan angka 0%. Pembahasan mengenai kemiskinan pada setiap indikator dapat disimak pada penjelasan berikut:

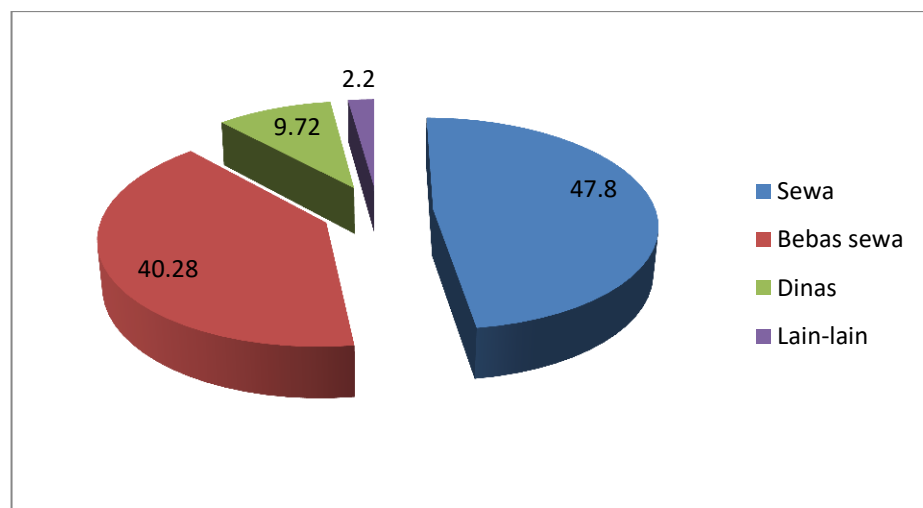
a. Kepemilikan rumah

Tingginya kemiskinan pada akses terhadap kepemilikan rumah tak lepas dari luas wilayah Kota Yogyakarta yang hanya 32,5km². Sementara jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2015 mencapai 412.704 jiwa dengan rincian sebanyak 201.082 jiwa penduduk laki-laki dan 211.622 jiwa penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 32,50 km², kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2015 sebesar 12.699 jiwa per km². Penduduk yang paling padat berada di Kecamatan Ngampilan yaitu sebesar 20.523 jiwa per km², dan paling jarang penduduknya di Kecamatan Umbulharjo yakni 10.663 jiwa per km² (BPS, 2017: 67). Angka kepadatan penduduk tersebut merupakan yang paling tinggi diantara daerah lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan kondisi lahan yang sempit dan mahalnya harga tanah, akan membuat akses kepemilikan rumah menjadi tak

terjangkau bagi warga menengah ke bawah. Kebanyakan mereka tinggal menyewa atau mendirikan lahan di pinggir bantaran sungai.

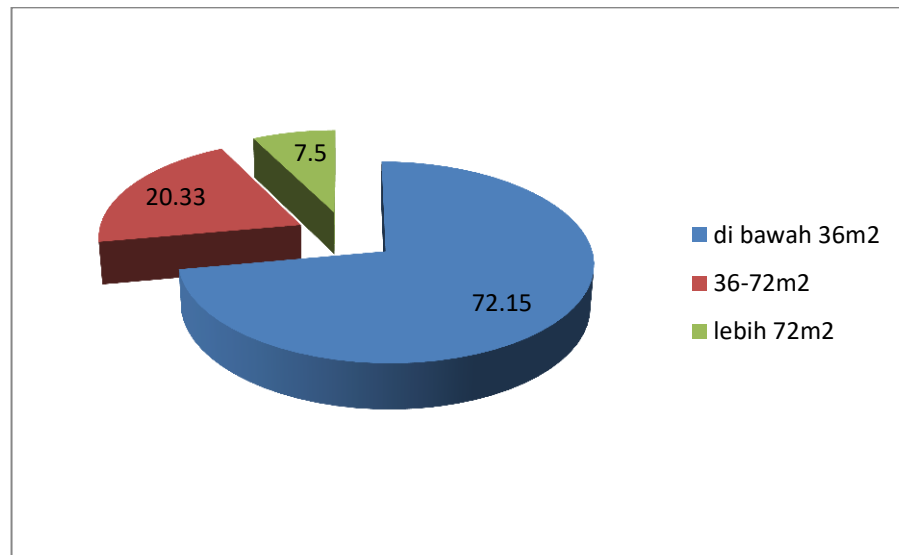
Dari 48,32% penduduk yang mengalami kemiskinan pada kepemilikan rumah, sebagian besar didominasi memiliki rumah dengan status sewa. Sebanyak 47,80% dari penduduk yang mengalami kemiskinan pada kepemilikan rumah memiliki rumah dengan status sewa. Urutan kedua ditempati bebas sewa dengan persentase 40,28%, disusul rumah dinas dengan 9,72%, dan terakhir lain-lain yang dihuni 2,20% penduduk kota Yogyakarta.



Gambar 21. Jenis Rumah yang Ditempati Penduduk yang Tidak Memiliki Rumah di Kota Yogyakarta Tahun 2016

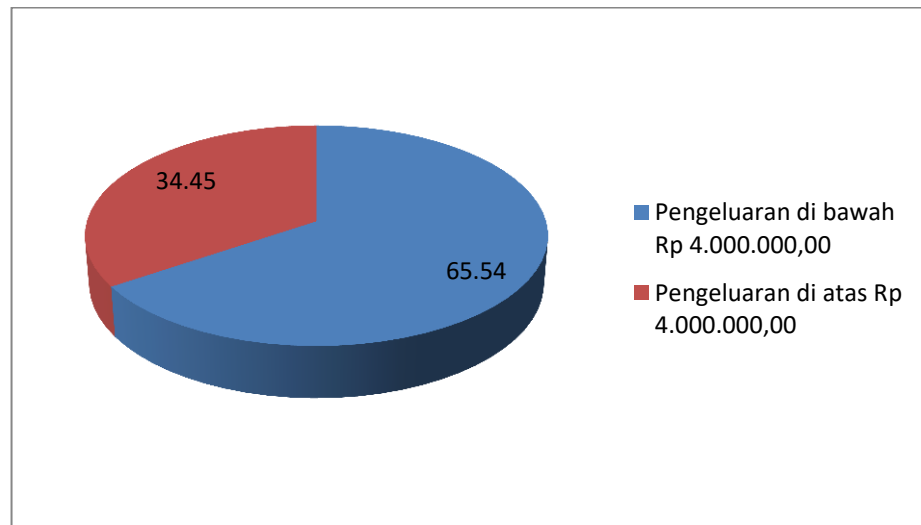
Ketidakmampuan dalam memiliki rumah tercermin dalam luas lahan yang dihuni oleh penduduk miskin. Sebanyak 72,15% penduduk menyewa rumah dengan ukuran di bawah 36m². Sementara 20,33% penduduk menyewa rumah dengan ukuran 36-72m². Hanya ada 7,5% penduduk yang menyewa rumah dengan

luas di atas 72 m². Data tersebut semakin menunjukkan bahwa masyarakat kecil memiliki kesulitan untuk mengakses kepemilikan rumah di Kota Yogyakarta.



Gambar 22. Luas Rumah yang Disewa Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Sulitnya masyarakat kecil memiliki rumah di Kota Yogyakarta harus menjadi perhatian pemerintah. Hal ini penting karena sebagian besar masyarakat yang mengalami kemiskinan dalam hal kepemilikan rumah memiliki penghasilan di bawah Rp.4.000.000,00. Dari rumah tangga yang tidak memiliki rumah, ada 34,45% yang memiliki pengeluaran di atas Rp 4.000.000,00. Sisanya 65,54% memiliki pengeluaran di bawah Rp 4.000.000,00.



Gambar 23. Pengeluaran Rumah Tangga di Kota Yogyakarta Tahun 2016 yang Tidak Memiliki Rumah Sendiri

Pemerintah Kota Yogyakarta harus memberikan solusi terhadap penduduk yang mengalami yang tidak memiliki rumah sendiri. Akses terhadap kepemilikan rumah kepada penduduk dengan penghasilan rendah harus dipermudah. Salah satu caranya adalah menyediakan rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan uang muka terjangkau. Mekanisme penyediaan dapat bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Daerah DIY.

b. Akses air bersih

Tingginya kemiskinan pada indikator akses terhadap air bersih dikarenakan sulitnya penduduk Kota Yogyakarta memiliki sumber air bersih sendiri dan berjarak minimal 10m dari *septic tank*. Sempitnya lahan di kota Yogyakarta membuat jarak sumber air bersih cenderung berdekatan dengan *septic tank*.

Dari hasil survey diketahui bahwa hanya 30,1% rumah tangga di Kota Yogyakarta yang memiliki sumber air bersih dengan jarak lebih dari 10m. Jika jarak *septic tank* dengan sumber air bersih terlalu dekat, maka hal tersebut akan berbahaya. Bakteri dari *septic tank* dapat mengontaminasi sumber air bersih sehingga air yang dihasilkan menjadi tidak layak digunakan.

c. Konsumsi kalori per kapita

Angka kemiskinan pada indikator konsumsi kalori per kapita menempati urutan ketiga tertinggi dengan jumlah 12,70%. Angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana terdapat 15,28% penduduk yang konsumsi kalorrinya di bawah kebutuhan minimum. Akan tetapi angka 12,70% masih terpaut tinggi bila kita melihat kondisi tahun 2013 di mana hanya 2,12% penduduk saja yang miskin pada kategori ini.

Semakin tinggi angka kemiskinan pada indikator ini memperlihatkan turunnya kesejahteraan yang dialami oleh penduduk. Ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan kalorinya per hari mencerminkan bahwa pendapatan mereka tidak mampu menjangkau pembelian bahan pangan. Hal ini bisa disebabkan oleh 2 hal yakni naiknya harga bahan pangan atau berkurangnya pendapatan penduduk.

Kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk kemiskinan pada indikator ini adalah

memberikan subsidi bahan pangan pada mereka yang dianggap miskin. Selain itu, menjaga tingkat inflasi juga perlu dilakukan agar harga tetap terjangkau penduduk miskin sehingga mereka mampu mempertahankan tingkat konsumsinya,

d. Bahan bakar memasak

Sebanyak 3,62% penduduk Kota Yogyakarta mengalami kemiskinan pada indikator bahan bakar memasak. Angka ini naik dari tinjauan tahun sebelumnya di mana terdapat 0,71% dan 0,59% penduduk yang menggunakan bahan bakar tidak layak untuk memasak pada tahun 2013 dan 2015.

Komposisi penduduk yang menggunakan bahan bakar memasak tidak layak adalah dengan menggunakan arang (1,51%), minyak tanah (1,28%), kayu bakar (0,61%), dan bahan bakar lainnya (0,11%).

Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memberikan bantuan berupa kompor gas dan perangkatnya bagi penduduk yang belum menggunakan gas sebagai bahan bakar memasak. Selain itu, subsidi berupa kupon untuk membeli gas juga perlu dilakukan untuk golongan penduduk yang tidak mampu membeli gas.

e. Layanan pendidikan pra sekolah

Dalam hal layanan pendidikan pra sekolah, terdapat 5,87% penduduk yang belum mendapatkan akses ke pendidikan pra sekolah. Angka ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota

Yogyakarta untuk memperhatikan akses terhadap pendidikan pra sekolah.

Keberadaan TK maupun PAUD sebagai sarana pendidikan pra sekolah sebetulnya cukup memadai. Di Kota Yogyakarta, terdapat 220 TK/PAUD yang tersebar di 45 kelurahan. Banyaknya sarana pendidikan pra sekolah harus dioptimalkan Pemkot Yogyakarta untuk memberikan layanan. Selain itu, Pemkot Yogyakarta harus tetap memberikan bantuan operasional bagi pelaksanaan pendidikan pra sekolah.

f. Sanitasi

Sebanyak 4,70% penduduk tidak memiliki sanitasi yang layak. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, jumlah penduduk yang tidak memiliki sanitasi sendiri mencapai 8,39% dan menurun menjadi 8,33%.

Bila dikaitkan dengan kepemilikan rumah, dari 4,7% yang tidak memiliki sanitasi sendiri, yang menempati rumah dengan status sewa berjumlah 2,06%. Sebanyak 1,56% penduduk yang memiliki rumah sendiri ternyata tidak memiliki sanitasi dan mereka menggunakan sanitasi umum/fasilitas MCK komunal. Sementara 1,06% penduduk yang tidak memiliki sanitasi sendiri menempati rumah berstatus lainnya.

Masih adanya penduduk yang tidak memiliki sanitasi sendiri harus menjadi perhatian pemerintah Kota Yogyakarta.

Pemerintah perlu memberikan bantuan kepada penduduk golongan ini, terutama penduduk yang memiliki rumah, namun tidak memiliki sanitasi sendiri.

g. Melek huruf

Dalam hal kemiskinan pada indikator melek huruf, masih ada 0,78% penduduk yang buta huruf. Angka ini menurun bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah penduduk yang mengalami buta huruf mencapai 3,1% dan meningkat menjadi 3,6% di tahun 2015.

h. Keberlangsungan pendidikan

Pada tahun 2016, angka kemiskinan untuk indikator keberlangsungan pendidikan mencapai 0,17%. Hasil ini tentu merupakan kemunduran bagi pemerintah Kota Yogyakarta mengingat pada tahun 2013 dan 2015 angka kemiskinan untuk indikator ini adalah 0%.

Rendahnya angka kemiskinan pada indikator ini menunjukkan keberhasilan Pemkot Yogya untuk mencegah anak putus sekolah. Program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogya adalah dengan memberi subsidi pada anak sekolah dari SD sampai SMA sehingga biaya operasional pendidikan (SPP) menjadi lebih murah. Sementara untuk golongan penduduk miskin, Pemkot menyediakan kursi hingga 20% bagi mereka agar mampu bersekolah di sekolah negeri.

i. Penolong persalinan

Pada tahun 2016 hanya ada 0,17% penduduk Kota Yogyakarta yang proses persalinannya tidak dibantu tenaga medis yang memadai. Angka tersebut meskipun kecil, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar mereka menjangkau penduduk golongan ini.

Tersedianya rumah sakit beserta tenaga medisnya membuat kecilnya angka kemiskinan pada indikator tersebut. Kota Yogyakarta memiliki 1 RSUD dan juga 1 Rumah Sakit Pratama yang siap memberikan pelayanan bagi penduduk bila akan melahirkan. Apalagi ditambah bantuan jaminan persalinan maka penduduk tidak perlu memikirkan biaya persalinan.

j. Listrik

Kemiskinan pada indikator listrik tercatat berjumlah 0,06%. Angka ini tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 penduduk yang tidak memiliki akses listrik sendiri mencapai 0,17%. Angka itu menurun menjadi 0,07% pada tahun 2015.

Bagi penduduk miskin yang belum memiliki akses listrik PLN, pemerintah dapat memberikan kemudahan dengan memfasilitasi biaya pemasangan. Sementara untuk pembayaran iuran rutin dapat dikordinasikan dengan lingkungan setempat yakni Rukun Warga tempat penduduk tersebut tinggal.

k. Atap, dinding, lantai

Untuk indikator atap, dinding, maupun lantai rumah yang dihuni, tidak ada penduduk Kota Yogyakarta yang mengalami kemiskinan. Angka ini turun dari 0,50% pada tahun 2015

Sementara bila dilihat secara terpisah pada komponen atap, dinding, maupun lantai rumah masih ada sebagian kecil penduduk yang mengalami kemiskinan. Pada atap rumah, masih ada 3,52% penduduk yang rumahnya beratapkan seng. Sementara pada dinding rumah, terdapat 3,34% penduduk yang rumahnya berdinding dari bahan bambu. Pada bagian lantai rumah, masih ada 0,34% penduduk yang rumahnya berlantaikan tanah.

Golongan penduduk di atas perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa perbaikan rumah sehingga rumah yang menjadi layak huni. Pemerintah dapat mengandalkan dana dari APBD maupun melakukan kerjasama dengan lembaga sosial maupun swasta untuk memberikan bantuan perbaikan rumah.

3. Perbandingan Kemiskinan Moneter dan Multidimensi di Kota Yogyakarta

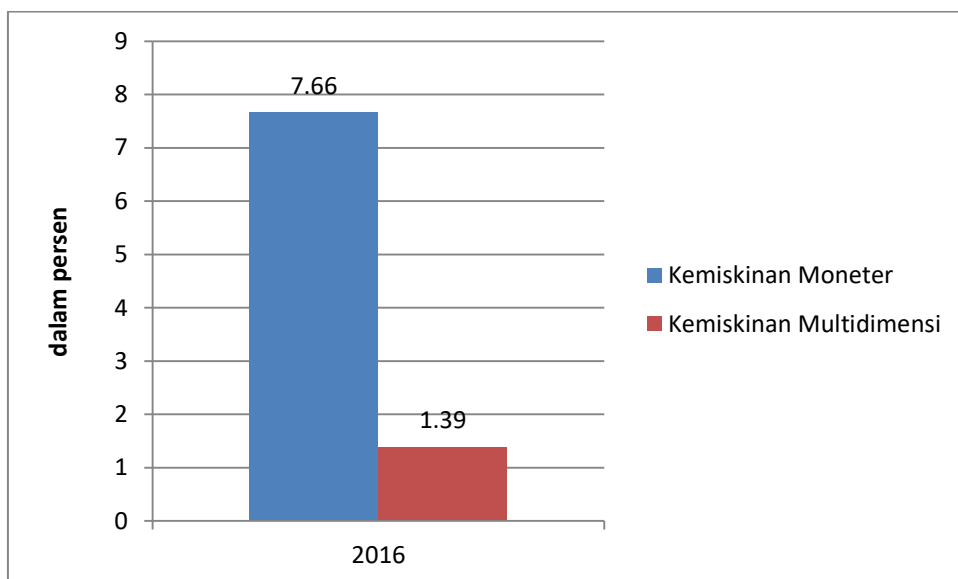
Angka kemiskinan multidimensi tahun 2016 lebih rendah bila dibandingkan dengan kemiskinan moneter. Pada tahun tersebut, angka kemiskinan multidimensi adalah 1,39%. Sedangkan jumlah penduduk miskin moneter mencapai 7,66%.

Tabel 8. Perbandingan Angka Kemiskinan Moneter dan Multidimensi Tahun 2016

	Rumah Tangga Miskin	Penduduk Miskin
moneter	7.64%	7.66%
multidimensi	1.56%	1.39%

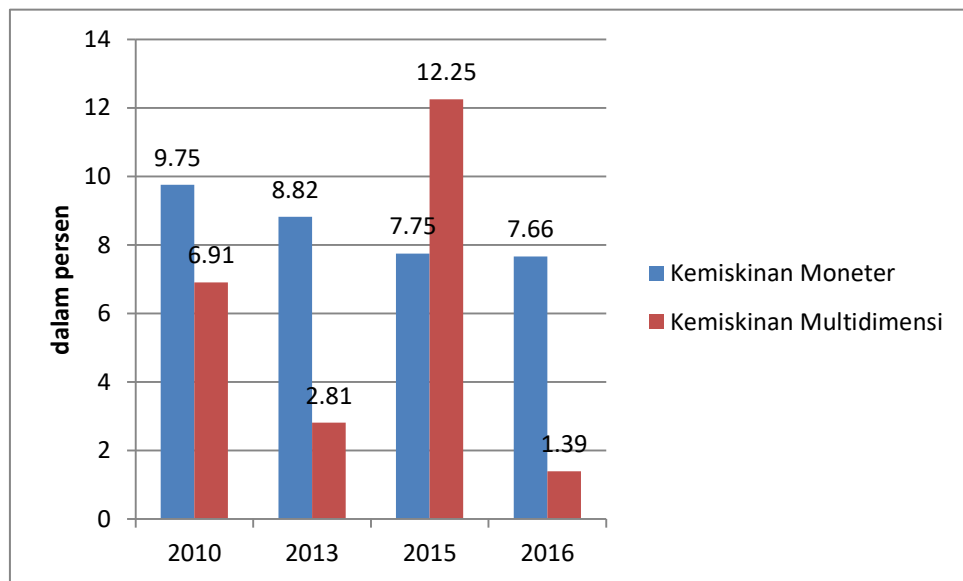
Sumber: BPS, 2016. Data diolah.

Pada tahun 2016, jumlah rumah tangga yang mengalami miskin multidimensi sebanyak 1,56%. Sementara penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi sejumlah 1,39%. Angka ini lebih rendah bila melihat tingkat kemiskinan moneter. Di tahun yang sama, terdapat 7,64% rumah tangga yang mengalami kemiskinan moneter di Kota Yogyakarta. Sementara penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi mencapai 7,66%.



Gambar 24. Perbandingan Antara Tingkat Kemiskinan Moneter dengan Multidimensi di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Sementara jika dilihat perbandingan berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, angka kemiskinan moneter selalu lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan multidimensi. Kecuali pada tahun 2015 di mana angka kemiskinan multidimensi lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan moneter.



Gambar 25. Perbandingan Antara Tingkat Kemiskinan Moneter dengan Multidimensi di Kota Yogyakarta 2010, 2013, 2015, dan 2016

Penurunan angka kemiskinan moneter di Kota Yogyakarta tergolong konsisten. Sementara kemiskinan multidimensi mengalami fluktuasi dan naik turun jumlahnya. Semakin turunnya angka kemiskinan baik moneter maupun multidimensi menunjukkan bahwa pemerintah berhasil dalam upaya mengentaskan penduduknya dari kemiskinan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kemiskinan moneter di Yogyakarta dihitung dengan menggunakan garis kemiskinan yang sejumlah Rp 401.193,00/kapita/bulan. Dari hasil perhitungan sebanyak 7,66% penduduk Kota Yogyakarta mengalami kemiskinan moneter.
2. Angka kemiskinan multidimensi di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 mencapai 1,39%. Sementara keparahan kemiskinan berada di angka 34,88% dan indeks kemiskinan multidimensi 0,00487. Dari berbagai indikator dalam pengukuran kemiskinan multidimensi, maka indikator atap, dinding, dan lantai rumah menempati indikator terendah dimana tidak ada penduduk kota Yogyakarta yang mengalami kemiskinan pada indikator tersebut. Sementara indikator tertinggi adalah kepemilikan rumah dimana sebanyak 48,32% penduduk mengalami kemiskinan pada indikator tersebut.
3. Perbandingan kemiskinan moneter dan multidimensi menunjukkan bahwa angka kemiskinan moneter lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan multidimensi. Sementara tren kemiskinan moneter menurun, angka kemiskinan multidimensi tergolong fluktuatif.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Yogyakarta harus senantiasa memperhatikan masalah kemiskinan. Bila terkait dengan kemiskinan moneter, maka yang perlu dilakukan pemerintah adalah mempertahankan daya beli yang dimiliki oleh masyarakat. Maka dari itu, Pemerintah Kota Yogyakarta harus menjaga tingkat inflasi. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan bantuan untuk hidup penduduk miskin. Bantuan dapat berupa bahan pangan seperti halnya yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan sifatnya saling melengkapi kebutuhan hidup penduduk miskin.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memikirkan kebijakan agar penduduk Kota Yogyakarta yang tidak mampu mengakses kepemilikan rumah untuk memiliki rumah sendiri. Penyediaan rumah susun menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
3. Pemerintah perlu bersinergi dengan lembaga sosial dan instansi swasta dalam hal pemberian bantuan bagi warga miskin agar mereka dapat meningkatkan kualitas kehidupannya.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yakni data yang digunakan hanya data satu tahun, sehingga sulit untuk melihat tren yang terjadi berkaitan dengan kemiskinan multidimensi.
2. Perbedaan dalam indikator dalam pengukuran kemiskinan multidimensi pada periode 2010-2016 sehingga sulit untuk melakukan perbandingan dan melihat kemajuan antar indikator.

3. Belum ada kajian mengenai kemiskinan per kecamatan sehingga sulit untuk mengidentifikasi beberapa wilayah yang perlu disentuh oleh program pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Razii, et all. (2014). Visa Masuk Kota: Alternatif Kebijakan Kaum Urban Untuk Mengatasi Kepadatan Penduduk Jakarta. PKM-GT Kemenristek Dikti.
- Alkire, Sabina, et all.(2015). *Multidimensional Poverty Measurement and Analysis*. Oxford University Press: New York.
- Alkire, Sabina & Santos, Maria Emma. (2013). *Multidimensional Approach: Poverty Measurement and Beyond (versi elektronik)*. Social Indicators Research, Vol 112, Issue 2. 239-257
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. 2017. *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2017*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta
- Chambers, Robert. (1987). *Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang*. LP3ES: Jakarta.
- Deliarnov. (2010). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fiaramonti, Lorenzo. (2017). *Problem Domestik Bruto* (Terjemahan Lita Soerjadi nata). Tangerang Selatan: Marjin Kiri. (Edisi asli diterbitkan tahun 2013 oleh Zed Books Ltd. London.
- Hafidh, Aula Ahmad, Maimun Sholeh dan Kiromim Baroroh (2016). *Fenomena Kemiskinan Perkotaan (Urban Poverty) di Yogyakarta : Suatu Kajian Struktur dan Respons Kebijakan*.
- Haq, Mahbub ul. (1983). *Tirai Kemiskinan, Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga* (Terjemahan Masri Maris). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. (Edisi asli diterbitkan tahun 1976 oleh Columbia University Press).
- Haris, Mokhamad. (2016). *Perhitungan Kemiskinan Multidimensi*. Jurnal Paradigma, Vol. 5 No.3, Desember 2016. Hal 132-142, ISSN: 2252-4266
- Iryanti, Rahmi. (2016). *Strategi Nasional Dalam Pencapaian Target Pengurangan Kemiskinan Tahun 2019*.
- Kartasmita, Ginanjar.(1996). *Pembangunan Untuk Rakyat*. PT Pustaka CIDESINDO: Jakarta

- Khomsan, Ali, et all. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Limbong, Bernhard. (2011). *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*. Jakarta : Pustaka Margaretha
- Lembaga Penelitian SMERU. (2001). *Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: BKPK dan SMERU.
- Maharani, Esthi. (2016). Luas Lahan Permukiman Kumuh DIY Capai 264,9 Hektare.Tersediadi
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/23/ofh9yk335-luas-lahan-permukiman-kumuh-diy-capai-2649-hektare>. Diakses tanggal 28 Oktober 2016.
- Masoed, Mochtar. (2003). *Politik Birokrasi, dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nuryitmawan, Tegar Rismanuar. (2016). *Studi Komparasi Kemiskinan di Indonesia: Multidimensional Poverty dan Monetary Poverty*. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, Juni 2016 Hal 33-41, ISSN: 2528-1879.
- Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI). (2015). *Constructing a Multidimensional Poverty Measure*.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2017). Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11, Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022
- Perkumpulan Prakarsa. (2013). Multidimensi Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia. Diakses online melalui http://theprakarsa.org/new/ck_uploads/files/MPI%20INDONESIA_CY_20_06_13.pdf
- Perkumpulan Prakarsa. (2015). Ringkasan Eksekutif Penghitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2012-2014.
- Prayitno, Hadi & Budi Santosa. (1996). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Prayitno, Hadi & Lincoln Arsyad. (1987). *Petani Desa dan Kemiskinan*. Yogyakarta: BPFE

- Presiden Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden RI Nomor 59, Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Rahardjo, Dawam. (2016). *Kebijakan Kesejahteraan Sosial Dalam Satu Dasawarsa Terakhir*. Dalam Ah, Maftuchan, Mickael B Hoelman, & Victoria Fanggidae (Eds). *Transformasi Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Manusia* (pp.xxv-xxxviii). Jakarta: LP3ES.
- Ras. Atma. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal Socius, Oktober-Desember 2013 Hal 56-63.
- Rintuh, Cornelis & Miara. (2003). *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Depdikbud
- Subandi. (2014). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, Bagong. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: In-Trans Publishing
- Tjiptoherianto, Priyono. (1996). *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Wardhana, D. (2010). *Multidimensional poverty dynamics in Indonesia (1993-2007)*. School of Economics, University of Nottingham.
- Yustika, Ahmad Erani. (2002). *Negara Vs Kaum Miskin*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Zailani, Lely. (2016). *Memotong Rantai Kemiskinan Petani Perempuan*. Dalam Ah, Maftuchan, Mickael B Hoelman, & Victoria Fanggidae (Eds). *Transformasi Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Manusia* (26-36). Jakarta: LP3ES.
- <http://www.jogjakota.go.id/news/TKPK-Kota-Yogya-Gelar-FGD-Tentang-Efektivitas-Program-Penanggulangan-Kemiskinan> diakses online pada 31 Oktober 2016.
- http://www.jogjakota.go.id/app/modules/upload/files/dok-perencanaan/RKPD_2016.pdf diakses online pada 31 Oktober 2016.

LAMPIRAN

No Respon	Jumlah	Indikator	Sanitasi	Air Bersih	Penolong	kalori	Melek hui	Kehadiran	Layanan p	kepemilik	dinding	listrik	energi	Total	Miskin
	ART	Bobot	0.083333	0.083333	0.083333	0.083333	0.111111	0.111111	0.111111	0.083333	0.083333	0.083333	0.083333		<0,333
1	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Tidak
2	2		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333 Tidak
3	1		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333 Tidak
4	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
5	4		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333 Tidak
6	1		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333 Tidak
7	4		0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.277778 Tidak
8	3		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
9	4		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333 Tidak
10	3		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333 Tidak
11	6		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.194444 Tidak
12	3		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333 Tidak
13	2		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
14	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Tidak
15	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.25	Tidak
16	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333 Tidak
17	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
18	6		0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.25 Tidak
19	5		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
20	5		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
21	6		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
22	2		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
23	5		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333 Tidak
24	4		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
25	5		0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.25 Tidak
26	4		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
27	4		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333 Tidak
28	6		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333 Tidak
29	5		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.166667 Tidak
30	4		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333 Tidak
31	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Tidak
32	2		1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.333333	Ya
33	4		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333 Tidak
34	4		0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0.277778 Tidak
35	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
36	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
37	4		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
38	5		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333 Tidak
39	4		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333 Tidak
40	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Tidak
41	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
42	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Tidak
43	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
44	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333 Tidak
45	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
46	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
47	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Tidak
48	3		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333 Tidak
49	6		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
50	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333 Tidak
51	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Tidak
52	3		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333 Tidak
53	8		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333 Tidak
54	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333 Tidak
55	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333 Tidak
56	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333 Tidak
57	5		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333 Tidak
58	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Tidak
59	5		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak
60	4		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667 Tidak

121	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
125	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	6	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
127	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
128	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
130	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
131	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
132	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
133	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
136	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
137	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
138	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	4	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
141	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	6	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
143	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
147	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
148	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
150	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
154	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
157	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
158	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
159	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
160	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
161	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
162	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
164	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
165	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
166	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
167	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
168	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
169	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
171	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
172	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
173	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
174	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
175	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
176	4	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
177	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
180	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

181	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
182	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
183	6	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
184	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.25	Tidak
185	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
186	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
187	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.166667	Tidak
188	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
189	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
190	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
191	5	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.25	Tidak
192	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
193	4	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0.277778	Tidak
194	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.25	Tidak
195	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
196	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
197	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
198	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
199	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
200	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
202	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
203	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
204	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.25	Tidak
205	3	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0.361111	Ya
206	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
207	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
208	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
209	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
210	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
211	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
212	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
213	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
214	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
215	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
216	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
217	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
218	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
219	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
220	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.166667	Tidak
221	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
222	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
223	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
224	5	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.25	Tidak
225	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
226	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
227	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
228	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
229	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
230	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
231	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
232	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
233	4	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.25	Tidak
234	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
235	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
236	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
237	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
238	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
239	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
240	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak

241	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.166667	Tidak
242	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
244	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
245	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
246	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
247	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
248	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
249	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
250	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
251	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
252	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
253	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
254	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
255	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
256	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
257	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
258	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
259	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
260	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.25	Tidak
261	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
262	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
263	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
264	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
265	7	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
266	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
267	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.25	Tidak
268	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
269	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0.277778	Tidak
270	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
271	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
272	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
273	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
274	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
275	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
276	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
277	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.083333	Tidak
278	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
279	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
280	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
281	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
282	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
283	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
284	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
285	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
286	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
287	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
288	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
289	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
290	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
291	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
292	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
293	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
294	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
295	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.083333	Tidak
296	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
297	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
298	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
299	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
300	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak

301	3		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
302	6		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
303	5		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
304	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
305	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
306	3		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.166667	Tidak
307	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
308	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
309	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
310	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
311	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
312	1		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
313	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
314	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
315	4		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
316	2		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
317	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
318	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
319	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
320	7		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
321	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
322	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
323	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
324	3		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
325	1		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.166667	Tidak
326	2		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
327	4		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
328	3		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
329	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
330	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
331	1		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
332	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
333	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
334	4		0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0.194444	Tidak
335	4		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
336	2		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
337	5		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
338	2		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
339	3		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
340	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
341	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
342	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
343	1		0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0.25	Tidak
344	1		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.166667	Tidak
345	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
346	3		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
347	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.25	Tidak
348	5		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
349	3		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
350	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
351	2		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
352	3		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.194444	Tidak
353	3		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0.194444	Tidak
354	5		0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0.25	Tidak
355	4		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
356	3		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
357	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
358	5		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
359	5		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
360	4		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak

421	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
422	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
423	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
424	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
425	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
426	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
427	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
428	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
430	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
431	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
432	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
433	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.25	Tidak
434	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
435	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
436	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
437	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
438	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
439	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.25	Tidak
440	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
441	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
442	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
443	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
444	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
445	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
446	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
447	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
448	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
449	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
450	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
451	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.166667	Tidak
452	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
453	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
454	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
455	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
456	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
457	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
458	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.166667	Tidak
459	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
460	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
461	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
462	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
463	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
464	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
465	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
466	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
467	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
468	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
469	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
470	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
471	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
472	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
473	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
474	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
475	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
476	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
477	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
478	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
479	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
480	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak

481	3		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
482	3		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
483	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
484	1		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667	Tidak
485	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333	Tidak
486	7		0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0.277778	Tidak
487	1		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667	Tidak
488	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333	Tidak
489	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
490	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
491	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
492	3		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333	Tidak
493	1		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667	Tidak
494	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333	Tidak
495	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667	Tidak
496	4		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
497	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
498	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
499	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
500	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
501	7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
502	2		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
503	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
504	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333	Tidak
505	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333	Tidak
506	1		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667	Tidak
507	3		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667	Tidak
508	6		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
509	5		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333	Tidak
510	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
511	1		0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0.333333	Ya
512	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
513	1		0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.25	Tidak
514	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667	Tidak
515	1		0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.25	Tidak
516	2		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.166667	Tidak
517	3		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667	Tidak
518	3		1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.25	Tidak
519	2		1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.361111	Ya
520	5		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.166667	Tidak
521	1		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
522	4		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
523	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
524	4		1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.333333	Ya
525	3		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667	Tidak
526	1		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
527	2		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
528	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
529	2		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
530	3		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667	Tidak
531	1		0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.25	Tidak
532	1		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667	Tidak
533	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667	Tidak
534	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333	Tidak
535	3		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.166667	Tidak
536	4		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333	Tidak
537	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
538	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.083333	Tidak
539	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667	Tidak
540	1		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.166667	Tidak

541	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
542	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
543	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
544	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
545	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
546	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
547	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
548	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
549	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
550	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
551	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
552	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
553	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
554	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
555	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
556	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
557	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
558	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
559	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
560	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
561	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
562	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
563	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0.166667	Tidak
564	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.166667	Tidak
565	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
566	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
567	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
568	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.166667	Tidak
569	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
570	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.166667	Tidak
571	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
572	7	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.25	Tidak
573	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
574	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
575	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
576	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
577	4	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0.388889	Ya
578	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
579	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
580	4	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.25	Tidak
581	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
582	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
583	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
584	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
585	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
586	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
587	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
588	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
589	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0.333333	Ya
590	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0.194444	Tidak
591	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
592	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
593	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
594	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
595	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
596	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.166667	Tidak
597	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.083333	Tidak
598	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
599	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
600	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak

601	2		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
602	3		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
603	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
604	3		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
605	3		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
606	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
607	4		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
608	2		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
609	4		0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.166667	Tidak
610	5		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
611	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
612	3		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
613	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
614	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
615	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
616	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
617	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
618	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
619	3		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
620	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
621	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
622	5		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.111111	Tidak
623	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
624	4		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.111111	Tidak
625	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
626	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
627	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
628	4		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
629	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
630	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
631	2		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.083333	Tidak
632	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
633	4		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083333	Tidak
634	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
635	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
636	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
637	4		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.111111	Tidak
638	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
639	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak
640	4		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.111111	Tidak
641	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak